AKATIGA - FATAYAT NU

KISAH KADER
PEREMPUAN KAWAL JKN

2021 - 2025

GLOBAL PARTNERSHIP FOR SOCIAL ACCOUNTABILITY
WORLD BANK GROUP
AKATIGA CENTRE FOR SOCIAL ANALYSIS
FATAYAT NU

PIMPINAN PUSAT

FATAYAT

NAHDLATUL ULAMA

https://fatayat-nu.or.id

KISAH KADER
PEREMPUAN KAWAL JKN
2021 - 2025

Mei, 2025

Nurul Widyaningrum
Rahmad Efendi
Aprilia Ambarwati
Moch. Fikry Pratama

Penyunting: Rahmad Efendi
Desain & Tata letak: Budi Gunawan

AKATIGA & FATAYAT NAHDLATUL ULAMA

Publikasi ini didukung oleh The World Bank melalui Program Global Partnership for Social Accountability (GPSA). Pandangan yang diungkapkan dalam publikasi ini sepenuhnya merupakan pandangan penulis dan tidak mencerminkan pandangan The World Bank.

GLOBAL PARTNERSHIP FOR SOCIAL ACCOUNTABILITY WORLD BANK GROUP AKATIGA CENTRE FOR SOCIAL ANALYSIS FATAYAT NU

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Advokasi	Tindakan memperjuangkan hak warga atau pasien agar mendapat layanan kesehatan yang layak.
BAZNAS	Badan Amil Zakat Nasional, lembaga pemerintah non struktural yang bertugas melakukan pengelolaan zakat
BPJS Kesehatan	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang mengelola Program JKN.
CSR	Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan).
Dinkes	Dinas Kesehatan, Instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pelayanan dan kebijakan kesehatan.
Dinsos	Dinas Sosial, Instansi pemerintah daerah yang menangani layanan sosial, termasuk verifikasi penerima bantuan.
DPD	Dewan Perwakilan Daerah atau struktur organisasi daerah pada Fatayat NU.
Faskes	Fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit.
Fatayat NU	Organisasi perempuan muda Nahdlatul Ulama, mitra pelaksana program di berbagai wilayah.
FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
FKRTL	Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan.
FUP	Follow-Up atau tindak lanjut.
IGD	Instalasi Gawat Darurat.
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional, Program jaminan sosial bidang kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Kader	Relawan perempuan pendamping masyarakat dalam program Kawal JKN.
KIS	Kartu Indonesia Sehat.
KK	Kartu Keluarga.
KTP	Kartu Tanda Penduduk.
LAZISNU	Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah Nahdlatul Ulama
MCK	Mandi, Cuci, Kakus (fasilitas sanitasi dasar).
NIK	Nomor Induk Kependudukan.
Operasi Caesar	Prosedur persalinan melalui pembedahan di bagian perut dan rahim.
PBI	Penerima Bantuan Iuran, skema JKN untuk masyarakat miskin/ rentan, iurannya dibayar pemerintah.
PBI APBD	PBI yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
PBI APBN	PBI yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pendampingan	Proses membantu warga mengakses layanan JKN dan mengatasi hambatan administratif/sosial.
Perempuan Kawal JKN	Program berbasis komunitas yang melibatkan kader perempuan mendampingi masyarakat akses JKN.
Reaktivasi	Pengaktifan kembali status kepesertaan JKN yang tidak aktif.
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah.
Rujukan	Proses pengiriman pasien ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.
RTLH	Rumah Tidak Layak Huni.
Sahabat Sehat Fatayat	Jaringan relawan lokal yang dibentuk untuk memperkuat dukungan kader.
SKTM	Surat Keterangan Tidak Mampu.
Sosialisasi	Kegiatan penyebaran informasi mengenai JKN kepada masyarakat luas.
UHC	Universal Health Coverage, Cakupan Kesehatan Semesta; kondisi di mana seluruh penduduk terlindungi oleh JKN.

SAMBUTAN

FATAYAT NU

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Segala puji dan Syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT., atas Rahmat, Hidayah, Inayah, dan Karunia-Nya dengan telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan tugas, peran, dan tanggung jawab kita di muka bumi ini. Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua menjadi yang terpilih untuk mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. aamiin.

Selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU masa Khidmah 2022-2027, saya merasa bahagia dan memberikan apresiasi atas diterbitkannya buka dengan judul: “Kisah Kader Perempuan Kawal JKN”. Buku ini merupakan hasil pendampingan program Bersama antara PP Fatayat NU dengan Akatiga selama 4 (empat) tahun di 8 (delapan) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pati, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kota Ternate. Selain itu, buku ini juga sangat relevan dengan kerja organisasi Fatayat NU karena Fatayat NU merupakan sebuah organisasi perempuan muda NU yang fokus pada isu-isu tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di berbagai aspek, termasuk kesehatan. Buku ini juga menunjukkan bahwa kader Fatayat NU memiliki komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan visi dakwah yang rahmatan lil'alaamiin. Mereka tidak hanya memiliki kapasitas yang terbatas pada isu dan perspektif keagamaan saja, tetapi juga mempunyai kapasitas pada isu dan perspektif kesehatan, serta memiliki kompetensi pendampingan kelompok perempuan dalam mengakses program JKN.

Penerbitan tulisan ini tentu juga sangat penting karena beberapa hal. Pertama, buku ini menjadi sarana dan media dokumentasi berbagi kisah dan cerita mengenai pengalaman, upaya, dan strategi kader Fatayat NU dalam mengatasi berbagai persoalan terkait dengan akses perempuan terhadap program JKN. Kedua, buku ini memberikan pentingnya membangun jejaring dalam upaya dan strategi mengatasi berbagai persoalan terkait dengan akses perempuan terhadap program JKN baik dengan pemerintah daerah setempat maupun dengan berbagai Lembaga dan organisasi terkait lainnya. Ketiga, buku ini juga dapat menjadi sarana pembelajaran dan inspirasi bagi sesama kader Fatayat NU yang tersebar di seluruh Indonesia, tepatnya di 37 provinsi.

Terimakasih kami sampaikan kepada Tim AKATIGA dan Tim Fatayat NU yang terlibat dalam program ini yang dengan konsisten melakukan upaya-upaya hingga dapat melahirkan karya ini. Terimakasih juga kepada seluruh penulis atas seluruh upayanya hingga dapat menerbitkan buku ini. Semoga buku ini menjadi karya dan prestasi terbaik, dan dicatat

sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir serta tidak pernah terputus karena telah memberikan manfaat tidak hanya bagi sesama kader Fatayat, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia.

Wallaahul Muwaffiq Ilaa Aqwaamith Thoriiq.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, Mei 2025

Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU
Masa Khidmah 2022-2027

Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, S.S., M.Si.

SAMBUTAN

AKATIGA

Buku ini disusun sebagai bentuk penghargaan yang tulus dan penghormatan kepada para kader Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) yang selama empat tahun terakhir telah bekerja tanpa lelah untuk mendampingi masyarakat miskin, rentan, dan berpenghasilan rendah dalam mengakses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang layak. Di delapan kabupaten/kota — Muaro Jambi, Jambi, Bandung, Tegal, Pati, Kediri, Blitar, dan Ternate — kader menjangkau pelosok wilayah, menyambangi rumah-rumah warga, dan menjadi jembatan harapan antara masyarakat dalam memperoleh hak dasarnya: hak untuk sehat dan mendapatkan pelayanan yang adil.

Delapan cerita ini mencatat kisah-kisah perjuangan yang nyata. Kader-kader turun langsung ke lapangan, melakukan sosialisasi dalam kelompok pengajian tentang hak-hak kesehatan warga miskin, menjelaskan cara mendaftar JKN, membantu proses administrasi yang kerap kali membingungkan, dan mendampingi warga yang sakit ke Puskesmas atau rumah sakit, mendampingi keluarga pasien dalam proses perawatan, hingga mendorong adanya pendanaan bagi pasien untuk membiayai hal-hal yang tidak ditanggung JKN.

Perjuangan yang dilakukan kader di atas tidak selalu mulus. Mereka terkadang berhadapan dengan keterbatasan infrastruktur layanan kesehatan, birokrasi yang rumit, data yang tidak sinkron, bahkan mendapatkan penolakan dan rasa skeptis dari berbagai pihak. Hal ini ditambah dengan kelelahan fisik dan emosional yang dialami kader, khususnya ketika mereka harus mendampingi pasien yang sudah terlambat diberikan penanganan hingga meninggal.

Kami menyadari bahwa perubahan tidak bisa diwujudkan oleh satu pihak saja. Ia lahir dari kolaborasi, dari keberanian untuk mendengarkan suara masyarakat miskin, serta kemauan untuk memperbaiki diri sehingga menghadirkan keadilan dalam layanan publik. Di balik setiap pasien yang berhasil mendapatkan layanan kesehatan, ada kerja sama yang terjalin antara kader dengan dinas sosial, Puskesmas, rumah sakit, pemerintah desa, BPJS, dan lembaga lainnya.

Melalui buku ini, kami ingin mengajak pembaca untuk menyelami semangat, keuletan, dan empati para kader. Cerita-cerita ini adalah cermin dari kerja-kerja sunyi yang berdampak besar. Di dalamnya terkandung semangat solidaritas, keberanian, dan ketekunan. Buku ini adalah suara para kader, sekaligus suara masyarakat yang mereka dampingi. Semoga buku ini menginspirasi lebih banyak pihak untuk peduli dan turut serta dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin atas layanan Jaminan Kesehatan Nasional yang adil dan bermartabat.

Selamat membaca!

Bandung, 5 Mei 2025
Charina Chazali
(Direktur Eksekutif AKATIGA)

PEREMPUAN
KAWAL
JKN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN i

SAMBUTAN FATAYAT NU iii
SAMBUTAN AKATIGA iv

PENGANTAR: PEREMPUAN MENGAWAL IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 03

MEMBANGUN JARING PENGAMAN KESEHATAN BERSAMA BAZNAS DI MUARO JAMBI 09
BERJUANG MENGATASI STUNTING DI KOTA JAMBI 19
MEMUTUS RANTAI CALO LAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN BANDUNG 29
MENJEMBATANI HARAPAN KELOMPOK RENTAN DI KABUPATEN TEGAL 39
MENJANGKAU MEREKA YANG TERLUPAKAN DI KABUPATEN PATI 49
MENGAWAL PERBAIKAN AKSES LAYANAN KESEHATAN DI KEDIRI 59
BERKHIDMAT UNTUK ANAK YATIM PIATU DI BLITAR 69
GERAK CEPAT MELAWAN KETERBATASAN DI TERNATE 79

EPILOG 89

FATAYAT NU
AKATIGA
CENTRE FOR
SOCIAL ANALYSIS
LOKAKARYA

NASIONAL GPSA
PEREMPUAN
KAWAL
JKN

PENGANTAR

PEREMPUAN MENGAWAL IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pada awal peluncurannya, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diragukan oleh masyarakat, yang masih menyimpan trauma atas layanan Askes yang dianggap kurang setara. Keluhan juga datang dari fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya terkait dengan keterlambatan pembayaran dari BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Serikat pekerja menolak program ini karena khawatir iuran mereka digunakan untuk membiayai masyarakat miskin, bukan untuk anggota sendiri. Di sisi lain, asuransi wajib dipandang sebagai bentuk kontrol negara yang mengancam kebebasan individu. Selain itu, persepsi buruk terhadap layanan publik turut melemahkan dukungan terhadap program tersebut.

Namun dalam satu dekade sejak peluncurannya, JKN menunjukkan capaian signifikan. Hingga tahun 2024, Dewan Jaminan Sosial Nasional mencatat bahwa cakupan kepesertaan hampir universal—sekitar 98% penduduk Indonesia telah terdaftar, meskipun sekitar 20% diantaranya merupakan peserta tidak aktif. Dari jumlah tersebut, lebih dari separuh (51,5%) adalah peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang disubsidi pemerintah. Jumlah fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan pun terus meningkat. Kepesertaan dalam JKN membantu masyarakat miskin untuk berobat dan mengurangi biaya yang harus mereka keluarkan sendiri.

MENGAPA HARUS DIKAWAL?

> **“Setelah menjalankan program ini baru sadar, kalau kebijakan pemerintah memang harus dikawal...”**
>
> Masrukha, Koordinator Tim Perempuan Kawal JKN Tegal

JKN adalah program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Sebagai program asuransi sosial, cakupan layanan JKN tergolong luas dan murah hati. Hampir semua jenis penyakit umum bisa ditanggung dalam skema JKN. Bantuan subsidi dari pemerintah memungkinkan mereka mengakses layanan kesehatan yang sebelumnya sulit dijangkau karena keterbatasan biaya. Jika sebelumnya masyarakat menunda berobat karena khawatir biaya, kini mereka dapat memperoleh layanan dengan lebih mudah.

Namun, masih banyak masyarakat miskin yang belum memahami syarat dan proses untuk menjadi peserta JKN PBI. Tak jarang, mereka yang seharusnya berhak justru tidak terdaftar, atau keanggotaannya tiba-tiba menjadi nonaktif tanpa penjelasan.

Masalah administratif dan hambatan teknis lainnya membuat masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok marjinal tetap kesulitan memanfaatkan layanan JKN secara optimal. Pengalaman kader Fatayat di berbagai daerah menggambarkan kompleksitas persoalan ini. Misalnya:

- **Di Kediri,** seorang anak yang tinggal bersama neneknya tidak dapat mendaftar sebagai peserta PBI karena NIK-nya tercatat di kartu keluarga ibunya yang tinggal di provinsi lain. Si Ibu harus melepas anak dari status Kartu Keluarga-nya, supaya bisa masuk ke dalam Kartu Keluarga neneknya.

- **Di Ternate,** seorang anak buruh lepas harus menjalani operasi jantung di Jakarta. Biaya pengobatan ditanggung JKN, tapi keluarga membutuhkan bantuan biaya transportasi dan hidup selama di Jakarta.

- **Di Pati,** seorang perempuan dengan gangguan jiwa kesulitan mendapatkan layanan karena harus memulai proses kepesertaan dengan pembuatan NIK di Disdukcapil. Kendalanya, perekaman data biometriknya terhambat karena yang bersangkutan mengamuk dan tidak bisa tenang.

- **Di wilayah lain,** ada pasien yang diminta membayar biaya transfusi darah, padahal transfusi merupakan layanan yang ditanggung oleh JKN.

Kasus-kasus ini menunjukkan dua hal penting. **Pertama,** proses pendaftaran JKN PBI bisa sangat panjang dan melibatkan lintas instansi, terutama bagi kelompok rentan. **Kedua,** masih ada miskonsepsi bahkan di kalangan penyedia layanan—misalnya anggapan bahwa JKN hanya menanggung rawat inap selama tiga hari, yang menyebabkan pasien dipulangkan sebelum waktu yang semestinya.

Padahal BPJS Kesehatan sudah menyediakan berbagai kanal pengaduan, seperti aplikasi Mobile JKN, WhatsApp, dan loket rumah sakit. Namun akses terhadap kanal ini masih terbatas bagi masyarakat miskin, baik karena kendala teknologi maupun literasi. Lebih jauh lagi, banyak persoalan sebetulnya memerlukan koordinasi lintas lembaga, bukan hanya penyelesaian oleh BPJS Kesehatan.

PEREMPUAN KAWAL JKN: KADER FATAYAT DAN PEMERINTAH DAERAH BERSAMA MENGAWAL AKSES LAYANAN

> **Kerja Fatayat ini membantu kami—pasien yang didampingi Fatayat beres urusan administrasinya.**
>
> Kepala RSUD Majalaya

> **Tadinya minta surat keterangan tidak mampu dipersulit. Tapi setelah kader datang, pihak desa dan puskesmas ikut membantu. Waktu kami masih di Jakarta dan butuh perpanjangan SKTM, kader yang bantu. Sekarang jadi lebih mudah.**
>
> N, ibu dari K, anak dengan masalah kesehatan kompleks

Selama empat tahun, Fatayat NU bersama AKATIGA bermitra dengan pemerintah di delapan kabupaten/kota—Muaro Jambi, Jambi, Bandung, Tegal, Pati, Kediri, Blitar, dan Ternate—untuk mengawal implementasi JKN. Para kader Fatayat bekerja di garis depan membantu masyarakat miskin mengakses layanan, mengurus administrasi pendaftaran, mendampingi pasien di rumah sakit, serta menjembatani komunikasi antara pasien dan fasilitas kesehatan.

Gambar 2. Lokasi Program Perempuan Kawal JKN

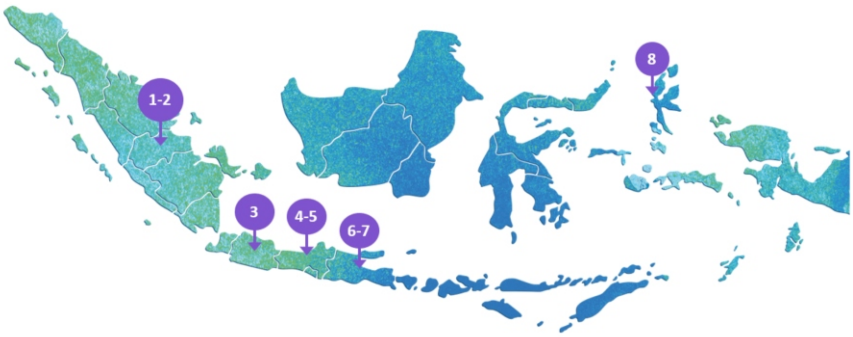

LOKASI KEGIATAN

1. Kota Jambi
2. Kab. Muaro Jambi
3. Kab. Bandung
4. Kab. Tegal
5. Kab. Pati
6. Kab. Kediri
7. Kab. Blitar
8. Kota Ternate

TENTANG PROGRAM

Dijalankan AKATIGA dan Fatayat Nahdlatul Ulama (NU), untuk periode 2021-2025 didikung oleh Global Partnership for Social Accountability (GPSA) yang dikelola Bank Dunia. Kolaborasi multipihak untuk mendampingi masyarakat miskin agar terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.

Tak jarang, mereka juga mencari bantuan dari lembaga amal seperti Baznas atau Lazisnu, atau bahkan menggalang dana secara mandiri. Dalam proses ini, kader juga menjadi agen komunikasi publik, menyebarkan informasi penting tentang JKN.

Meski bekerja tanpa honor tetap, dedikasi kader sangat tinggi. Mereka kerap menerima panggilan bantuan di malam hari, dan bahkan dihubungi langsung oleh rumah sakit karena pengetahuan mereka dianggap membantu kelancaran layanan.

Tugas ini juga emosional. Ada kebahagiaan saat pasien sembuh dan mendapatkan haknya. Tapi juga kesedihan, ketika pertolongan datang terlambat. Beban juga muncul saat masyarakat menuntut hasil atas proses yang belum tentu menjadi tanggung jawab langsung kader. Bagi para kader, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah bentuk khidmat, pengabdian dalam semangat Fatayat dan NU. Dalam setiap sosialisasi, mereka menanamkan nilai Islam seperti gotong royong—bahwa yang sehat membantu yang sakit.

Buku ini adalah bentuk penghargaan atas perjuangan para kader Perempuan Kawal JKN. Kami berharap kisah-kisah di dalamnya mencerminkan semangat, kerja keras, dan ketulusan mereka. Meskipun program ini secara resmi berakhir pada Juni 2025, para kader dan pengurus Fatayat di daerah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan perjuangan ini—dan mudah-mudahan bisa menjangkau lebih banyak wilayah ke depan.

KISAH KADER

PEREMPUAN KAWAL JKN

KABUPATEN MUARO JAMBI

MEMBANGUN JARING PENGAMAN KESEHATAN BERSAMA BAZNAS DI MUARO JAMBI

PERJUANGAN KELUARGA AMI

Ami, seorang anak perempuan berusia sembilan tahun, didiagnosis menderita penyakit kelenjar getah bening. Penyakit itu menyerang dengan cepat, dan dalam waktu singkat Ami harus menjalani dua kali operasi di RSUD Raden Mattaher, Kota Jambi. Orangtuanya, pasangan petani di salah satu desa di Kabupaten Muaro Jambi, merasa dunia mereka runtuh. Biaya pengobatan yang tinggi membuat mereka putus asa, hingga mereka bertemu dengan Tim Kader Perempuan Kawal JKN Muaro Jambi.

Beruntung, Ami sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga biaya operasi dapat ditanggung. Namun pasca-operasi, kebutuhan perawatan lanjutan dan biaya transportasi menimbulkan tantangan baru. Tim kader bergerak cepat: mereka mengajukan proposal bantuan ke BAZNAS Kabupaten dan Provinsi Jambi. Hasilnya, Dalam waktu sebulan, bantuan berhasil diperoleh sehingga keluarga Ami bisa melanjutkan proses perawatan. Keluarga Ami mendapatkan bantuan biaya untuk pemulihan di rumah dan untuk perjalanan lanjutan ke Jakarta, di mana Ami harus menjalani perawatan lebih lanjut untuk menuju kesembuhannya.

MENYISIR DESA, MENEMBUS BIROKRASI

Sejak awal program pada 2021, Tim Kader Perempuan Kawal JKN Muaro Jambi telah menjadikan pendampingan masyarakat miskin sebagai misi utama mereka. Tim ini, dipimpin oleh Suhaibatul Aslamiyah, rutin menyisir desa-desa di Kabupaten Muaro Jambi untuk mengidentifikasi warga yang belum terdaftar JKN. Mereka membantu proses pendaftaran, reaktivasi, perubahan data, hingga edukasi penggunaan aplikasi JKN Mobile.

Koordinasi lintas lembaga menjadi kekuatan utama tim ini. BPJS Kesehatan Muaro Jambi, sejak awal, mendukung penuh gerakan kader, bahkan melibatkan mereka dalam gerai pendaftaran peserta baru. Dinas Sosial memberikan akses terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mempermudah pengiriman SKTM langsung ke rumah pasien jika keluarga tidak mampu hadir. Dinas Kesehatan pun turut bekerja sama dalam verifikasi data masyarakat miskin.

Foto 4. Pendampingan pasien dalam mengakses JKN di Muaro Jambi

Dampak dari kerja tim kader tak hanya dirasakan masyarakat, tapi juga oleh rumah sakit. RSUD Raden Mattaher bahkan kerap menghubungi kader Yully Hapsari untuk membantu pasien yang menghadapi kendala dalam kepesertaan JKN. Pengakuan atas kiprah kader pun diformalkan pada Februari 2025 ketika MoU antara Tim Kader dan BPJS Kesehatan diteken. Dalam MoU tersebut, tim resmi menjadi agen Program PESIAR, yang memberi mandat mereka untuk mendampingi masyarakat di 14 desa.

Tak hanya membantu Ami, kader-kader Muaro Jambi juga menyelamatkan banyak pasien lainnya. Kader Yully Hapsari mendampingi Ratna, janda penderita kista yang tak mampu membayar tunggakan JKN. Bantuan dari BAZNAS memungkinkan Ratna menjalani operasi dan mengaktifkan kembali JKN-nya. Kader Mia Audina menghadapi dilema etika saat menemukan peserta PBI dari golongan mampu dan beberapa peserta mandiri yang menolak melunasi tunggakan. Di satu kasus, pasien tersebut akhirnya harus menjalani operasi sesar tanpa perlindungan JKN, hingga keluarga terpaksa membayar denda.

Kader Siti Ussa'diyah mendampingi pasien luka bakar yang menjalani empat kali operasi di dua rumah sakit berbeda, semua tertangani berkat JKN. Kader Nurmalis bahkan mendampingi beberapa pasien dalam jangka panjang: penderita diabetes sejak Maret 2023, seorang anak laki-laki dengan gangguan pencernaan sejak akhir 2022, hingga penderita tumor usus yang menjalani kemoterapi sepanjang akhir 2024. Sementara Fitriyani, kader yang baru bergabung pada 2024, telah membantu validasi data masyarakat miskin di kecamatan dan mengadvokasi bantuan biaya ke BAZNAS.

KERJA AMAL BERSAMA BAZNAS

Salah satu tantangan terbesar yang kerap dihadapi pendampingan kader di lapangan adalah kebutuhan pasien akan biaya-biaya penunjang yang tidak ditanggung oleh JKN. Dalam konteks ini, kolaborasi dengan lembaga lain menjadi sangat penting.

Menjawab tantangan tersebut, para kader menjalin kemitraan strategis dengan BAZNAS di tingkat Kabupaten dan Provinsi Jambi. Kolaborasi ini tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses dialog dan pendekatan yang intensif. Para kader aktif membangun komunikasi dengan pengurus BAZNAS, menjelaskan urgensi kebutuhan pasien, dan menunjukkan rekam jejak pendampingan mereka di masyarakat. Kepercayaan mulai tumbuh, dan BAZNAS mulai membuka ruang untuk sinergi.

Dalam praktiknya, kader menjadi penghubung langsung antara keluarga pasien dan BAZNAS. Mereka membantu menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mendampingi proses pengajuan proposal bantuan, hingga memastikan dana yang disalurkan digunakan secara tepat. Di beberapa kasus, kader juga turut hadir saat pihak BAZNAS melakukan survei lapangan, menjelaskan kondisi sosial ekonomi pasien secara langsung. Proses ini mempercepat penyaluran bantuan dan membangun transparansi antara semua pihak yang terlibat.

Hingga akhir tahun 2024, tercatat lebih dari 35 pasien telah menerima bantuan dari dana zakat yang dikelola BAZNAS. Bantuan tersebut meliputi berbagai kebutuhan penting seperti pelunasan tunggakan iuran JKN agar pasien bisa aktif kembali sebagai peserta, biaya transportasi dan akomodasi ke rumah sakit rujukan di luar daerah, hingga pembelian obat-obatan dan alat kesehatan yang tidak tercakup dalam skema JKN. Dalam satu kasus, bantuan dari BAZNAS menjadi penentu keberangkatan seorang anak untuk menjalani perawatan lanjutan di Jakarta—sesuatu yang sebelumnya hanya sebatas harapan bagi keluarga kurang mampu.

Lebih dari sekadar bantuan finansial, kolaborasi ini menciptakan jaring pengaman sosial yang hidup di tingkat lokal. Program Kawal JKN, yang pada awalnya berfokus pada advokasi dan pendampingan administratif, berkembang menjadi ruang sinergi antara komunitas, negara, dan lembaga filantropi. Para kader menjadi aktor penghubung yang menjembatani kebijakan publik dengan mekanisme solidaritas lokal seperti zakat. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa penguatan sistem jaminan kesehatan nasional tidak bisa berdiri sendiri, melainkan perlu disokong oleh gerakan kolektif dan kepedulian antar-lembaga.

Dengan membangun kemitraan yang kuat dengan BAZNAS, Tim Kader Muaro Jambi berhasil memperluas cakupan intervensi mereka—dari mendampingi pasien mengurus kartu JKN, hingga memastikan mereka benar-benar mendapatkan layanan kesehatan secara utuh, tanpa terhambat oleh kendala ekonomi. Ini adalah contoh nyata bagaimana inisiatif berbasis komunitas dapat bertransformasi menjadi kekuatan sosial yang mampu memperbaiki kesenjangan dalam sistem pelayanan kesehatan.

DARI SEKADAR RELAWAN MENJADI AGEN PERUBAHAN

Para kader tidak datang dari satu latar belakang yang sama. Ada guru SMP, mahasiswi, pendamping desa, hingga ibu rumah tangga. Namun satu hal menyatukan mereka: keinginan untuk memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam perlindungan kesehatan.

Iba, sang koordinator, menyebut program ini sebagai jalan baru yang mempertemukannya dengan pemangku kepentingan daerah. Sementara itu Rahma, staf data, melihat pentingnya dokumentasi dalam proses advokasi kebijakan. Sedangkan kader seperti Yully dan Nurmalis merasa bahwa keberadaan mereka kini diakui sebagai bagian dari solusi, bukan hanya relawan di pinggiran. Lalu bagi Fitriyani yang baru bergabung, pengalaman ini membuka matanya akan pentingnya advokasi berbasis data dan tindakan langsung.

> **Sebelum program ini, saya tidak pernah tahu siapa orang di Dinas Kesehatan atau BPJS. Sekarang, kami saling mengenal dan bekerja bersama**

Iba, Koordinator Kader Perempuan Kawal JKN Muaro Jambi

> **Setiap cerita adalah bukti, dan setiap bukti bisa mengubah kebijakan.**

Rahma, Staf Data

> **Tidak cukup hanya tahu teori soal jaminan kesehatan. Kita harus turun, mendengarkan, dan bergerak.**

Fitriani, Kader

Melalui kerja mereka, para kader Muaro Jambi membuktikan bahwa sistem jaminan kesehatan nasional tidak hanya soal kartu dan iuran, tapi tentang jembatan kemanusiaan. Dan mereka adalah pilar dari jembatan itu.

Para kader Muaro Jambi melihat peran mereka bukan sekadar sebagai pendamping administratif, tetapi sebagai agen perubahan sosial. Mereka menyadari bahwa tantangan dalam akses layanan kesehatan tidak hanya bersumber dari aspek birokrasi, tetapi juga dari keterbatasan ekonomi, ketidaktahuan masyarakat, dan lemahnya kolaborasi antar-lembaga.

Melalui pendekatan gotong royong dan kerja lintas sektor, para kader berhasil membangun ekosistem pendampingan yang tidak hanya menyelesaikan kasus, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di tingkat lokal. Bagi mereka, keberhasilan bukan semata-mata jumlah kasus yang diselesaikan, tetapi keberlanjutan kolaborasi yang terbangun. Kisah-kisah ini menjadi bukti nyata bahwa jika masyarakat diberdayakan, sistem jaminan kesehatan dapat benar-benar menjangkau mereka yang paling rentan.

MENGENAL KADER PEREMPUAN KAWAL JKN KABUPATEN MUARO JAMBI

Suhaibatul Aslamiyah

Iba adalah Pendamping Desa dan Sekretaris PW Fatayat NU Jambi. Sejak 2021, ia memimpin Tim Perempuan Kawal JKN Muaro Jambi. Bagi Iba, program ini membuka akses komunikasi langsung dengan pemangku kepentingan seperti BPJS, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Sebelum terlibat, ia tidak memiliki koneksi dengan institusi-institusi ini. Melalui program ini, Iba tidak hanya memperluas jaringannya, tetapi juga memperkuat advokasi layanan kesehatan bagi masyarakat rentan. Kepemimpinannya membuat tim ini aktif dalam berbagai bentuk pendampingan, mulai dari administrasi JKN hingga pendampingan layanan di fasilitas kesehatan.

Siti Rahmawati

Rahma adalah guru SMP dan Sekretaris PC Fatayat NU Muaro Jambi. Sejak 2021, ia menjadi staf data dalam Tim Kawal JKN. Perannya penting dalam menghimpun dokumentasi pendampingan yang dilakukan para kader. Data dan kisah yang dikumpulkan Rahma menjadi bukti konkret kinerja tim, sekaligus bahan utama untuk audiensi dan pelaporan kepada pemangku kepentingan. Rahma juga turut menjaga konsistensi pelaporan antar kader, memastikan setiap cerita lapangan tersampaikan dengan baik. Dengan keahliannya dalam mencatat dan merangkum kisah, ia membantu tim membangun narasi pendampingan yang kuat dan berpengaruh dalam mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BAZNAS dan dinas-dinas terkait.

RTS Yully Hapsari

Yully adalah ibu rumah tangga dan anggota PW Fatayat NU Jambi. Salah satu pendampingannya yang paling membekas adalah membantu Ratna, seorang janda penderita kista rahim dengan dua anak. Karena tunggakan JKN, Ratna tidak bisa berobat. Yully mengupayakan bantuan dari BAZNAS Provinsi untuk melunasi iuran dan membiayai operasinya. Ia juga membantu proses perubahan status Ratna menjadi peserta PBI. Berkat pendampingan Yully, Ratna akhirnya mendapat akses layanan dan kesehatannya membaik. Kisah ini mencerminkan betapa pentingnya peran kader sebagai penghubung masyarakat miskin dengan sumber dukungan, baik formal maupun filantropis.

Mia Audina

Mia adalah guru SMP dan anggota PW Fatayat NU Jambi. Selain mendampingi pasien ke fasilitas kesehatan, ia aktif menangani kasus-kasus pelik terkait kepesertaan JKN. Ia kerap menemukan peserta yang tergolong mampu tetapi menolak pindah ke JKN Mandiri atau enggan melunasi tunggakan. Salah satunya baru bersedia membayar setelah menjalani operasi sesar, namun rumah sakit menolak klaim karena pelunasan dilakukan setelah tindakan. Pengalaman ini memperlihatkan kompleksitas edukasi JKN di lapangan. Mia juga membantu pengajuan bantuan ke BAZNAS, dan tetap sabar dalam menghadapi berbagai karakter masyarakat yang ia dampingi.

Siti Ussa'diyah

Diah adalah mahasiswi dan anggota PC Fatayat NU Muaro Jambi. Ia aktif sebagai kader sejak 2022 dan banyak mendampingi warga dalam urusan administrasi JKN—dari pendaftaran, reaktivasi, pengecekan iuran, hingga perubahan data. Salah satu kasus penting yang ditanganinya adalah pendampingan perempuan korban luka bakar dengan 35% bagian tubuh yang rusak. Pasien itu menjalani empat operasi dan harus pindah rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Berkat status JKN aktif, seluruh biaya ditanggung. Diah menyadari pentingnya JKN sebagai jaring pengaman kesehatan dan menjadikan pendampingan ini sebagai pengingat akan peran vitalnya sebagai kader.

Nurmalis

Nurmalis adalah ibu rumah tangga dan anggota PC Fatayat NU Muaro Jambi. Ia dikenal karena konsistensinya mendampingi pasien dalam jangka panjang. Salah satunya adalah pasien diabetes yang ia dampingi sejak Maret 2023 untuk kontrol rutin dan operasi mata. Ia juga mendampingi anak dengan infeksi pencernaan dari 2022 hingga 2024. Terakhir, ia mendampingi perempuan penderita tumor usus menjalani operasi dan kemoterapi. Nurmalis juga mengupayakan bantuan ke BAZNAS untuk semua pasien tersebut. Pendekatan telaten dan kesabaran Nurmalis membuatnya menjadi tumpuan banyak warga saat menghadapi situasi kesehatan kronis dan berbiaya tinggi.

Fitriyani

Fitriyani adalah mahasiswi dan Wakil Ketua PW Fatayat NU Provinsi Jambi. Ia bergabung dalam tim sejak April 2024 menggantikan kader sebelumnya. Meski tergolong baru, ia cepat beradaptasi dan aktif dalam sosialisasi manfaat JKN, pengecekan status kepesertaan, serta validasi data masyarakat miskin untuk pengajuan peserta PBI. Ia juga menjembatani koordinasi antara kader dan pihak kecamatan, serta mendampingi beberapa pasien dalam proses rujukan dan pengajuan bantuan ke BAZNAS. Peran Fitriyani memperkuat upaya tim dalam advokasi dan integrasi data di tingkat lokal.

KISAH KADER

PEREMPUAN KAWAL JKN

BERJUANG MENGATASI STUNTING DI KOTA JAMBI

KETIKA STUNTING MENJADI PINTU MASUK AKSI KEMANUSIAAN

Yani, balita berusia empat tahun di Kota Jambi, bukan hanya menderita stunting. Ia juga mengalami gangguan ginjal, radang paru-paru, dan pengecilan jaringan otak. Tubuhnya kurus dan rapuh, kulitnya pucat, dan tatapan matanya sayu. Sejak 2023, kondisinya terus dipantau oleh Tim Kader Perempuan Kawal JKN Kota Jambi. Namun, butuh lebih dari sekadar niat baik untuk mendampingi Yani. Perjalanan panjang dilakukan: dari penggalangan dana yang melibatkan berbagai komunitas, pendampingan ke rumah sakit di Jakarta, hingga pencarian bantuan nutrisi yang memadai untuk menunjang pertumbuhan dan proses pemulihannya.

Foto 7. Mendampingi Pasien Anak di Kota Jambi

Kisah Yani bukan satu-satunya. Ayu, balita lain yang juga mengalami stunting berat, sempat terlantar karena orang tuanya harus bekerja di luar kota. Tubuh Ayu lemah, dan ia kerap jatuh sakit. Nila dan Putri, dua anak dari keluarga dengan penghasilan tak menentu, menghadapi kondisi serupa. Putri bahkan nyaris putus sekolah karena sakit berkepanjangan dan tidak ada biaya berobat.

Masalah stunting yang mengemuka di Kota Jambi membuka jalan bagi tim kader untuk membuktikan betapa serius dan terorganisasinya kerja mereka. Mereka tidak hanya mendampingi secara medis, tetapi juga menjadi jembatan sosial yang menjangkau institusi bantuan, rumah ibadah, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan pendekatan empatik, para kader menyadarkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan sehat, dan setiap orang tua pantas mendapatkan dukungan.

Masalah stunting yang mengemuka di Kota Jambi membuka jalan bagi tim kader untuk membuktikan betapa serius dan terorganisasinya kerja mereka. Mereka tidak hanya mendampingi secara medis, tetapi juga menjadi jembatan sosial yang menjangkau institusi bantuan, rumah ibadah, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan pendekatan empatik, para kader menyadarkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan sehat, dan setiap orang tua pantas mendapatkan dukungan.

DARI STUNTING KE ADVOKASI KOMPREHENSIF

Tim Perempuan Kawal JKN Kota Jambi menunjukkan bahwa pendampingan bukan hanya bicara soal akses layanan kesehatan. Setiap kasus stunting selalu diikuti oleh persoalan sosial-ekonomi: kekurangan gizi, kurangnya pengetahuan keluarga tentang pola asuh sehat, hingga tidak adanya jaminan kesehatan aktif. Ketika Dinas Sosial kehabisan anggaran dan meminta bantuan kader untuk seorang ibu yang tak mampu membayar biaya persalinan, tim bergerak cepat. Mereka mendatangi rumah sakit, melakukan negosiasi langsung dengan manajemen, menyusun proposal bantuan ke BAZNAS kota dan provinsi, dan akhirnya dana pun terkumpul. Pasien dapat pulang, tanpa terbebani utang medis.

Dari stunting, kanker, hingga gangguan penglihatan, para kader mengurus semuanya. Total lebih dari 37 pasien mendapat bantuan dari BAZNAS sepanjang 2024. Kader tidak hanya bertugas sebagai pendamping, tetapi juga sebagai penghubung yang menjembatani pasien ke dalam sistem perlindungan sosial. Mereka memastikan setiap pasien terdaftar di JKN, membantu pengurusan reaktivasi kepesertaan yang nonaktif, dan menyelesaikan berbagai persoalan administratif lainnya yang kerap menjadi penghambat utama masyarakat miskin untuk mengakses layanan.

Bahkan, pada kasus pasien dengan trauma terhadap biaya rumah sakit, para kader tak segan menyambangi rumah-rumah warga untuk membujuk mereka agar bersedia berobat. "Kami pernah menemui seorang ibu yang memilih mengobati anaknya dengan ramuan tradisional karena takut tidak mampu membayar rumah sakit. Kami ajak bicara pelan-pelan, tunjukkan bahwa ada jalan keluar," cerita Tika Saputri, anggota tim yang bertanggung jawab atas data dan dokumentasi kasus.

Tak heran jika Kota Jambi mencatatkan peningkatan tingkat UHC dari 97,64% pada 2021 menjadi 98,49% pada 2024. Pada Maret 2024, Kota Jambi menerima penghargaan UHC Awards dari BPJS Kesehatan. Meskipun penghargaan itu berskala kota, kontribusi kecil kader di lapangan jelas menjadi pendorong signifikan yang kerap tidak disebut dalam laporan resmi.

BUKTI YANG MEMBANGUN KEPERCAYAAN

Kerja kader yang terus-menerus akhirnya membuahkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga BAZNAS di tingkat kota dan provinsi menjalin koordinasi erat dengan mereka. Bahkan, dalam beberapa kasus, lembaga-lembaga tersebut tidak lagi menunggu laporan masyarakat, melainkan secara proaktif meminta bantuan kader untuk menindaklanjuti temuan di lapangan.

Foto 8. Kolaborasi dengan Baznas Kota Jambi

Beberapa kali BAZNAS memberi akses informasi program bantuan bagi yatim piatu, dengan harapan tim kader dapat menyalurkan informasi tersebut kepada keluarga dampingan yang paling membutuhkan. Misalnya, pasien Rani—seorang pelajar SMK—yang didiagnosis TB Tulang. Rani berasal dari keluarga buruh harian. Dari pengurusan hasil CT scan hingga operasi yang harus dilakukan di Palembang, kader mendampingi secara penuh. Mereka mengakseskan bantuan transportasi dan akomodasi, mengawal proses operasi, serta memastikan pasien menyelesaikan terapi pengobatan hingga tuntas.

Pasien-pasien stunting seperti Nila juga dibantu hingga delapan kali mendapatkan susu dan biaya akomodasi. Susu formula yang sesuai dengan kebutuhan medisnya tidak mudah didapat dan harganya mahal. Bantuan tersebut bukan sekadar formalitas bantuan sosial, tetapi merupakan wujud kehadiran kader sebagai penggerak sosial yang benar-benar memahami kondisi di lapangan. Mereka bukan hanya pengantar bantuan, tetapi juga penjamin moral agar bantuan digunakan secara tepat sasaran.

Selain bantuan fisik, tim kader juga mulai membangun kesadaran keluarga melalui penyuluhan dan diskusi kelompok. Di beberapa kelurahan, mereka bekerja sama dengan posyandu dan puskesmas untuk mengadakan kelas pengasuhan anak, gizi keluarga, dan pentingnya imunisasi. Mereka berusaha mengubah pola pikir masyarakat dari sekadar menerima bantuan menjadi memahami dan menjaga kesehatan secara mandiri.

MISI KEMANUSIAAN YANG TAK BISA DITINGGALKAN

"Sudah terlanjur nyemplung," kata Novriana Dewi, Koordinator Tim Perempuan Kawal JKN Kota Jambi, sambil tersenyum. Bagi Novriana, mendampingi masyarakat miskin dan marjinal bukan sekadar program kerja, tapi sudah menjadi bagian dari misi kemanusiaan yang tidak bisa dihentikan. Ia mengenang awal mula keterlibatannya, yang dimulai dari satu kasus tetangga yang tak bisa berobat karena kartu JKN-nya nonaktif.

> **“Dari situ, saya sadar betapa banyak orang yang terjebak dalam sistem yang tidak mereka pahami.”**
>
> Novriana Dewi, Koordinator Tim Perempuan Kawal JKN Kota Jambi

Tim kader ini berisi para perempuan dari berbagai latar belakang: dosen, guru, pegawai kementerian, ibu rumah tangga, hingga penulis lepas. Ada Tika Saputri, yang menjaga nyawa data lapangan sebagai staff data; Misrawati dan Ulandari, yang aktif mendampingi pasien-pasien kritis dan turut terlibat mengajar pola asuh sehat di posyandu; Nori Nopita Sari, yang mengurus aktivasi JKN masyarakat; dan Ratih Armelia, yang harus menguatkan hati ketika pasien dampingan meninggal karena kanker. RTS Yulina Marwita bahkan membantu warga mendapatkan kacamata dengan memanfaatkan hak sebagai peserta JKN.

Kerja kolektif ini tidak hanya memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan, tetapi juga menciptakan ekosistem solidaritas. Para kader menjadi jembatan antara sistem kesehatan formal dengan kebutuhan nyata masyarakat. Mereka bukan pegawai pemerintah, bukan staf rumah sakit, tetapi relawan sosial yang menjadi tumpuan harapan warga. Mereka bergerak dengan keterbatasan, namun menjadikan keterbatasan itu sebagai kekuatan.

Mereka juga tidak ragu membagi pengalaman dan pengetahuan antar sesama kader. Dalam pertemuan rutin, mereka mengevaluasi kasus, mencari strategi baru, dan menguatkan satu sama lain. Kader yang semula tidak percaya diri kini bisa berbicara di hadapan pejabat atau memfasilitasi forum warga. Solidaritas ini tumbuh bukan karena insentif, tetapi karena semangat kolektif.

Kota Jambi hari ini boleh membanggakan angka UHC-nya, tapi kerja diam-diam para kader inilah yang menggerakkan angkanya dari balik layar. Dalam senyap, mereka menyalakan api kecil harapan bagi warga yang nyaris putus asa. Mereka tidak menunggu kebijakan turun atau program diluncurkan. Mereka menciptakan solusi dengan jejaring, empati, dan keberanian untuk mengetuk setiap pintu kemungkinan.

MENGENAL KADER PEREMPUAN KAWAL JKN KOTA JAMBI

Novriani Dewi

Dosen IAIMA Kota Jambi ini juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Bidang Ekonomi dan Kesehatan PW Fatayat NU Jambi sekaligus Koordinator Tim Perempuan Kawal JKN Kota Jambi. Ia memimpin satu staf data dan lima kader dalam membantu masyarakat miskin dan marjinal mengakses layanan JKN. Novriani percaya bahwa bantuan sekecil apa pun sangat berarti bagi pasien. Baginya, kegiatan ini telah menjadi misi kemanusiaan yang sulit ditinggalkan, terutama ketika ia memiliki informasi dan jaringan untuk membantu. Ia melihat bahwa kehadiran Fatayat NU sangat penting dalam memperjuangkan hak-hak kesehatan warga miskin, dan ia merasa terdorong untuk terus melanjutkan peran ini sebagai bentuk kontribusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Tika Saputri

Sebagai staf Kantor Wilayah Kemenag Kota Jambi dan Wakil Ketua II PW Fatayat NU Jambi, Tika berperan sebagai staf data dalam Tim Perempuan Kawal JKN Kota Jambi. Ia bertugas mengumpulkan dan mencatat informasi dari kader di lapangan. Data ini menjadi dasar gerak tim sekaligus bukti kerja pendampingan yang dilakukan. Tika memegang peran penting dalam menjaga alur informasi yang mendukung keberhasilan program. Ia percaya bahwa pencatatan yang baik adalah bagian dari kerja kemanusiaan. Baginya, meski tidak terjun langsung mendampingi pasien, peran di balik layar ini sama pentingnya untuk memastikan masyarakat miskin tetap mendapat akses terhadap layanan kesehatan yang layak dan berkelanjutan.

Misrawati

Sebagai guru di MI Muhajirin Kota Jambi dan anggota Pengurus PW Fatayat NU Jambi, Misrawati tergabung dalam Tim Perempuan Kawal JKN sejak Februari 2023. Selain mendampingi pasien stunting, ia juga turut membantu berbagai kasus medis, termasuk mendampingi RGP, seorang anak yang menderita TB Tulang. Misrawati berperan aktif dalam pengajuan proposal bantuan ke BAZNAS untuk kebutuhan transportasi dan akomodasi pasien saat dirujuk ke Palembang untuk operasi. Setelah operasi, ia terus mendampingi RGP selama terapi pemulihan. Bagi Misrawati, pendampingan ini adalah wujud nyata dari misi kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam mengakses hak kesehatan mereka.

Nori Nopita Sari

Dosen di Institut Agama Islam Muaro Jambi (INISMA) dan Ketua PC Fatayat NU Kota Jambi, Nori bergabung dalam Tim Perempuan Kawal JKN pada Oktober 2023. Meskipun sibuk dengan tugas akademik dan organisasi, Nori tetap aktif mendampingi masyarakat dalam mendapatkan akses kesehatan melalui JKN. Ia juga banyak melakukan sosialisasi di berbagai SMA, pesantren, dan universitas. Nori sering menemukan kasus kepesertaan JKN yang tiba-tiba non-aktif, membuat banyak warga bingung, padahal mereka adalah peserta lama. Berkat pendampingannya, banyak orang dapat mengatasi masalah status kepesertaan JKN dan memastikan mereka tetap terdaftar untuk mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan.

Ratih Armelia Kusari

***Freelance writer* yang juga anggota PC Fatayat Kota Jambi,** Ratih bergabung dengan Tim Perempuan Kawal JKN sejak Februari 2023. Selain mendampingi pasien stunting seperti KN, Ratih banyak membantu masyarakat dalam berbagai kasus, termasuk status kepesertaan JKN yang non-aktif atau ada tunggakan. Salah satu pengalaman emosional Ratih adalah mendampingi CH, pasien kanker payudara yang juga menderita tumor, masalah liver, dan gangguan ginjal. Ratih mendampingi CH di rumah sakit hingga pasien meninggal dunia. Meski kisah ini menyedihkan, Ratih merasa penting untuk mendampingi pasien dan keluarga dalam situasi sulit, serta memastikan hak-hak mereka terjamin dengan adanya JKN.

RTS Yulina Marwita

Ibu rumah tangga yang aktif sebagai pengurus PC Fatayat NU Kota Jambi, Yuli bergabung dalam Tim Perempuan Kawal JKN sejak Agustus 2023. Ia banyak mendampingi pasien stunting dan membantu masyarakat dengan status kepesertaan JKN yang tidak aktif. Salah satu pengalamannya adalah membantu seorang pasien perempuan dengan gangguan penglihatan yang akhirnya dapat mendapatkan kacamata melalui JKN. Yuli juga berperan dalam memastikan masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam JKN mendaftar Program Jambi Bugar. Baginya, setiap bantuan yang diberikan kader kepada pasien adalah langkah kecil namun penuh makna dalam memastikan masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

Ulandari

Guru di lembaga bimbingan belajar dan anggota Fatayat NU Kota Jambi, Ulandari tergabung dalam Tim Perempuan Kawal JKN sejak Juli 2022. Ia pernah membantu seorang pasien, KD, yang ditolak puskesmas karena tidak memiliki kartu JKN, padahal status kepesertaan KD aktif. Ulandari mengajarkan KD untuk menggunakan JKN Mobile agar bisa menunjukkan kartu secara digital. Pengalamannya juga mencakup pendampingan terhadap bayi yang dirawat di rumah sakit dengan status JKN non-aktif, yang membuat keluarga pasien harus menanggung biaya perawatan sementara menunggu proses reaktivasi. Ulandari merasakan dilema emosional antara melihat pasien sembuh dan kekecewaan keluarga yang merasa terbebani biaya medis karena keterlambatan reaktivasi JKN.

KISAH KADER

PEREMPUAN KAWAL JKN

KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUS RANTAI CALO LAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN BANDUNG

BAYANG-BAYANG CALO DI RUMAH SAKIT

Toni, bocah lelaki berusia delapan tahun asal Kabupaten Bandung, harus menjalani perawatan intensif di RSUD Majalaya setelah mengalami komplikasi pasca sunat. Keadaan ini membuat orang tuanya panik. Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mereka sudah lama menunggak, dan mereka tidak memiliki cukup uang untuk membayar biaya pengobatan. Dalam situasi yang genting itu, muncul seorang pria tak dikenal yang menawarkan bantuan administratif. Ia meminta KTP, KK, dan sejumlah uang sebesar Rp250.000. Terdesak dan tidak tahu harus berbuat apa, keluarga Toni menyerahkan dokumen dan uang tersebut.

Keesokan harinya, pria itu mengabarkan bahwa Toni sudah bisa pulang. Orangtua Toni merasa lega, namun keganjilan muncul ketika pihak rumah sakit menghubungi mereka dan menyatakan bahwa Toni keluar tanpa proses administrasi yang sah. Lebih parahnya, masih ada tagihan sebesar Rp1.900.000 yang belum terbayar, dan pihak rumah sakit sama sekali tidak menerima pembayaran dari pria tersebut. Kejadian ini membuat keluarga Toni terpuruk secara mental dan ekonomi.

Tati, kader Fatayat NU, dan Yayu, koordinator tim Perempuan Kawal JKN, segera bergerak setelah mendengar cerita ini. Mereka menelusuri informasi dan mendatangi rumah keluarga Toni. Dari hasil penyelidikan, mereka memastikan bahwa pria yang membantu keluarga Toni adalah calo ilegal yang kerap memanfaatkan kepanikan keluarga pasien. Tak ada satupun dana yang masuk ke kas rumah sakit. Tati dan Yayu tak tinggal diam. Mereka segera menggalang dana internal dari sesama kader dan menghubungi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk menutupi biaya perawatan Toni. Berkat kerja cepat mereka, tagihan rumah sakit akhirnya bisa dilunasi, dan keluarga Toni tidak perlu berhutang.

KOLABORASI AKAR RUMPUT DAN PENDEKATAN PERSONAL

Di Kabupaten Bandung, kader perempuan Fatayat NU berperan aktif sebagai penghubung antara sistem layanan kesehatan dan masyarakat rentan. Mereka aktif melakukan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di lima kecamatan melalui forum komunitas seperti pasar, pengajian, dan masjid. Posisi kader sebagai bagian dari komunitas memberi kepercayaan lebih dari warga, yang sering menjadikan mereka tempat pertama untuk mengadu.

Namun, tantangan muncul di tingkat desa, terutama ketika terjadi resistensi dari aparat seperti Puskesos. Petugas merasa kader Perempuan Kawal JKN telah melampaui wewenang dengan membantu pendaftaran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah desa. Ketegangan sempat terjadi di sebuah desa. Di sana, tim pernah kesulitan mengakses data DTKS karena tidak adanya kerja sama dari Puskesos.

Foto 10 . Kolaborasi dengan Puskesos

Menghadapi tantangan ini, kader tidak menyerah dan terus membangun komunikasi di tingkat desa, serta komunitas lintas lembaga—termasuk Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan—untuk memastikan prioritas bersama, bahwa warga miskin tetap terdata dan mendapat layanan kesehatan sesuai hak mereka. Dari upaya tersebut, kader Perempuan Kawal JKN berhasil membangun kolaborasi penting dengan stakeholder di akar rumput seperti Puskesos, Bidan dan pemerintahan Desa hingga lintas lembaga tingkat kabupaten.

Untuk memperkuat kolaborasi, tim Perempuan Kawal JKN Bandung membentuk grup WhatsApp yang berisi perwakilan rumah sakit, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Grup ini menjadi saluran komunikasi efektif untuk menangani permasalahan lapangan secara cepat.

Salah satu keberhasilan kolaborasi tersebut adalah pendampingan pasien Tini, perempuan 30 tahun dari keluarga miskin yang menderita kista di rahim. Tini awalnya berobat mandiri, namun setelah diketahui adanya kista, ia disarankan menjalani pemeriksaan lanjutan yang biayanya cukup besar. Tini menghubungi Kader Eka untuk meminta bantuan. Eka menindaklanjuti dengan mendatangi Puskesos di desa Tini yang sudah memiliki data DTKS terbaru. Dibantu pihak Puskesos, Eka membantu melengkapi dokumen dan menginformasikan kasus ini melalui grup WhatsApp stakeholder untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Dinsos. Hasilnya, Tini berhasil terdaftar sebagai peserta PBI dan menerima layanan kesehatan secara gratis.

Selain menguatkan kolaborasi akar rumput, kunci lain keberhasilan pendampingan kader terletak pada pendekatan personal. Para kader Perempuan Kawal JKN dan Sahabat Sehat Fatayat berupaya untuk menyentuh para pasien secara personal agar tumbuh kepercayaan dan rasa aman. Pendekatan personal ini misalnya diterapkan dalam mendampingi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Kader Eka secara rutin mengantar 10 ODGJ dari pesantrennya untuk kontrol dan pengobatan, bahkan mencarikan tempat tinggal ketika diperlukan—bahkan dengan dana pribadi. Dedikasi ini menjadikan kader sebagai garda terdepan dalam menjembatani kesenjangan layanan.

Foto 11. Menjalankan pendampingan secara personal pada pasien

MENGUATKAN GERAKAN KESEHATAN BERBASIS KOMUNITAS

Program subsidi JKN yang diluncurkan oleh Bupati Bandung pada tahun 2022 menjadi momentum penting bagi masyarakat miskin di kabupaten tersebut. Program ini menyasar kelompok rentan seperti aparat desa, guru mengaji, pengurus masjid, dan RT, dan turut berkontribusi terhadap peningkatan kepesertaan JKN. Pada 2024, Kabupaten Bandung berhasil meraih UHC Award setelah cakupan JKN mencapai 98%. Peningkatan jumlah peserta juga dibarengi oleh peningkatan kualitas layanan.

Keberhasilan Kabupaten Bandung dalam memperluas cakupan JKN dan meningkatkan kualitas layanan tidak lepas dari kontribusi tim kader perempuan Fatayat. Kehadiran kader perempuan dalam program Kawal JKN bukan hanya tentang mendampingi administrasi, tetapi juga memainkan peran vital sebagai penghubung antara sistem layanan kesehatan dan masyarakat yang paling rentan.

Bagi para kader, pekerjaan ini bukan hanya soal membantu warga. Lebih dari itu, ini adalah panggilan moral dan bentuk nyata keberpihakan terhadap kelompok miskin dan marginal. Yayu, koordinator tim, mengingat kembali saat ia pertama kali mendampingi pasien. "*Itu bukan warga miskin, tapi dari situ saya sadar bahwa sistem harus adil dan bisa diakses semua orang,*" kenangnya. Bagi Yayu, keadilan layanan kesehatan adalah fondasi masyarakat yang bermartabat.

Alis, kader yang bertanggung jawab mendata peserta dan program, menyoroti pentingnya jaringan. *"Dulu kita kerja sendiri-sendiri, sekarang ada sistem komunikasi cepat. Itu kekuatan kita sekarang,"* ujarnya. Dengan adanya grup WhatsApp, masalah yang sebelumnya butuh waktu berhari-hari kini bisa selesai dalam hitungan jam. Cici, seorang guru mengaji dan kader senior, mencatat bahwa kehadiran kader perlahan mengubah pandangan masyarakat terhadap JKN. Ia melihat kepercayaan masyarakat sebagai kekuatan utama gerakan ini.

> **“Dulu banyak yang takut atau bingung soal JKN. Sekarang mereka percaya karena ada yang bisa mereka andalkan”**
>
> Cici, Kader

Namun mereka tidak menutup mata terhadap tantangan. Wilayah Kabupaten Bandung yang luas, medan geografis yang sulit, dan akses transportasi yang terbatas membuat jangkauan kader tidak selalu maksimal. Karena itulah penguatan jaringan Sahabat Sehat Fatayat menjadi prioritas. Dengan adanya koordinator lokal di tiap kecamatan, pemerataan informasi dan pendampingan bisa lebih terjamin.

Kader juga menyadari pentingnya dukungan dari lingkaran terdekat mereka. Eka, misalnya, sering diingatkan oleh suaminya untuk menjaga kesehatannya sendiri. *"Kalau saya jatuh*

siapa yang mau bantu warga?" katanya sambil tertawa. Ia dan kader lain mendapat kekuatan dari dukungan komunitas, dari ucapan terima kasih pasien, dan dari organisasi Fatayat yang terus menguatkan mereka.

Kini, para kader tidak hanya menjadi penyambung lidah antara rakyat dan sistem layanan kesehatan. Mereka adalah wajah solidaritas, simbol dari perlawanan terhadap sistem yang tidak adil. Dengan semangat yang menyala dan keberanian yang terus tumbuh, mereka memperluas peran, menyambung tangan negara kepada rakyatnya, dan memperjuangkan hak atas layanan kesehatan yang manusiawi bagi semua.

MENGENAL KADER PEREMPUAN KAWAL JKN KABUPATEN BANDUNG

Yayu Juariyah

Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Bandung sekaligus koordinator program Kawal JKN. Selain sebagai ibu rumah tangga, Yayu aktif mengelola sekolah dan berbagai organisasi keagamaan. Awalnya bingung menjalankan program, titik baliknya datang saat mendampingi tokoh NU ke rumah sakit. Meski bukan orang miskin, pengalaman itu membuka matanya akan pentingnya JKN. Sejak itu, Yayu berkomitmen penuh membantu masyarakat rentan mengakses layanan kesehatan. Ia tidak ragu turun langsung mendampingi pasien, menjadi motor penggerak utama tim di berbagai kecamatan, dan menjaga komunikasi intensif dengan stakeholder melalui grup WhatsApp.

Alis Siti Maesaroh

Bertugas pada pendataan program, Alis adalah guru ASN dan pemimpin Yayasan Mathla'ul Huda Majalaya. Ia juga aktif di berbagai organisasi pendidikan dan keagamaan. Di Fatayat, ia bertanggung jawab di bidang kesehatan dan lingkungan. Pengalaman pribadinya saat persalinan dengan bantuan stakeholder memotivasinya untuk membantu orang lain. Salah satu pendampingan yang berkesan adalah saat ia membantu ibu dengan depresi akibat tekanan ekonomi dan riwayat keluarga. Alis mendampingi ke poli jiwa RS Majalaya hingga pasien mendapatkan penanganan yang layak. Ia percaya sinergi dengan stakeholder menjadi kunci sukses penyelesaian kasus.

Eka Widiyawati

Kader aktif di Kecamatan Ibun sekaligus Ketua PAC Fatayat. Ibu rumah tangga ini juga memiliki usaha pengurusan pernikahan, mengelola TK, kelompok belajar, dan pondok pesantren. Ia merawat 100 anak yatim dan 10 ODGJ secara rutin, termasuk memastikan mereka kontrol kesehatan dan mendapat obat. Eka dikenal luas oleh masyarakat; banyak warga menghubunginya untuk konsultasi KIS. Meski pekerjaannya menuntut energi besar, bahkan membuat suaminya kadang khawatir, Eka tetap bersyukur. Bagi Eka, menjadi kader adalah kesempatan membangun jaringan sosial luas, membantu yang rentan, dan menjalankan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari.

Tati Nurhayati

Seorang guru Diniyah dan aktivis di berbagai lembaga pendidikan dan sosial. Salah satu pendampingan paling mengesankan adalah saat membantu perempuan muda korban penipuan kerja. Korban hamil lima bulan dan kembali ke Bandung dalam kondisi trauma dan tanpa akses layanan. Tati membantu mengaktifkan KIS PBI, berkoordinasi dengan tim kesehatan untuk pemantauan kehamilan hingga persalinan. Dedikasinya memastikan korban mendapat layanan yang layak mencerminkan kepeduliannya pada perempuan rentan. Peran Tati sangat penting dalam menjembatani masyarakat dengan sistem kesehatan, terutama dalam kasus-kasus darurat dan penuh tekanan sosial.

Cici Cintyaningrum

Guru mengaji dan pengurus yayasan pendidikan yang aktif di Fatayat mengikuti jejak almarhum ayahnya. Ia merasa puas saat berhasil membantu pasien, meski tak lepas dari tantangan emosional. Salah satu kisah paling membekas baginya adalah kematian bayi dari ibu miskin karena keterlambatan proses aktivasi JKN. Ibu tersebut sebelumnya menjanjikan pengambilan kartu, namun tak sempat. Cici melihat kasus ini sebagai refleksi bahwa sistem layanan masih menyulitkan orang miskin. Ia berharap ke depan proses JKN bisa lebih cepat dan manusiawi, agar tidak ada lagi nyawa yang hilang hanya karena hambatan administratif.

Sri Rindi Rukmini

Guru Madrasah Diniyah dan pengurus Fatayat Bidang Kesehatan serta Ketua BKMM Kecamatan Ciparay. Rindi dikenal gigih dalam mendampingi warga miskin mendaftar JKN PBI dari dana APBD. Ia menangani banyak kasus, termasuk seorang pasien dengan keluhan lambung dan asam urat yang harus dirujuk ke spesialis. Meski faskes 1 ditanggung JKN, proses rujukan memerlukan ketekunan karena antrean panjang. Rindi tetap sabar memastikan pasien tetap terlayani. Perannya penting sebagai penghubung antara sistem layanan kesehatan dan pasien yang seringkali kewalahan menghadapi prosedur birokratis.

Yanti Rosmayanti

Kader yang fokus pada kasus-kasus berat, salah satunya menangani pasien dengan kulit melepuh, sesak nafas, dan obesitas. Saat pasien tidak aktif JKN dan menunggak Rp2,8 juta, Yanti sigap mengurus SKTM ke desa agar perawatan tetap bisa dilakukan. Ia juga menjembatani pelunasan tunggakan melalui bantuan Baznas dan kepala desa. Pendekatannya yang praktis dan responsif terhadap situasi darurat menjadi nilai tambah besar dalam sistem Kawal JKN. Yanti juga menjadi penghubung yang strategis dari kerja-kerja tim kepada pemangku kepentingan pemerintah.

KISAH KADER

PEREMPUAN KAWAL JKN

KABUPATEN TEGAL

MENJEMBATANI HARAPAN KELOMPOK RENTAN DI KABUPATEN TEGAL

DARI PESAN WHATSAPP KE AKSES LAYANAN

Pada Jumat pagi, 21 Juli 2023, Siti Ainul Fahmiyah menerima sebuah pesan WhatsApp yang akan membuka sebuah cerita perjuangan dan solidaritas. Pesan itu datang dari Rina, seorang ibu tunggal dari Desa Pamiritan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Anaknya yang berusia lima tahun, Roni, tengah terbaring lemah di Puskesmas akibat diare dan demam tinggi. Ketiadaan jaminan kesehatan membuat keluarga Rina harus menanggung biaya pengobatan sendiri. Jumlahnya tidak sedikit—lebih dari satu juta rupiah—dan hanya bisa dibayar berkat bantuan dari tetangga dan kerabat.

Rina bukan sosok asing bagi Ainul. Beberapa bulan sebelumnya, Ainul pernah membantu Rina mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk dirinya. Namun, saat itu kedua anaknya, termasuk Roni, belum berhasil didaftarkan karena belum terdata dalam sistem. Roni sendiri memiliki riwayat gangguan pertumbuhan dan berat badan yang tidak ideal, namun keterbatasan biaya membuat Rina tidak mampu membawanya berobat secara rutin. Situasi ini menjadi pukulan berat bagi Rina yang juga berjuang sendiri menghidupi anak-anaknya setelah ditinggal suami.

Tanpa menunggu lama, Ainul segera bergerak. Ia menghubungi perangkat desa, Yuyun, untuk mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), langkah awal penting untuk pendaftaran peserta JKN kategori Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID). Walau keluarga Rina belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Ainul tidak menyerah. Ia meyakinkan Yuyun bahwa pendampingan ini sangat mendesak dan penting demi keselamatan anak.

Dengan tekun dan cekatan, Ainul menyusun semua dokumen yang diperlukan, berkoordinasi dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), mengatur tanda tangan camat dan verifikasi Dinas Sosial. Di sela-sela kewajiban mengajar sebagai guru, ia meluangkan waktu demi memastikan proses ini berjalan cepat. Beberapa hari kemudian, keluarga Rina akhirnya resmi terdaftar sebagai peserta JKN kategori PBID. Roni kini bisa mendapatkan pengobatan lanjutan tanpa perlu memikirkan biaya.

Foto 13. Mendampingi dan mengunjungi pasien dan keluarga

Perjuangan ini menggambarkan betapa kompleks dan menantangnya peran kader seperti Siti Ainul di tengah berbagai kesibukan pribadinya. Para kader harus memahami birokrasi, menjalin jaringan lintas lembaga, dan menavigasi celah sistem yang seringkali tidak ramah bagi warga miskin, dan hal itu perlu dilakukan dengan cepat dan tepat. Semua itu dilakukan demi satu tujuan: memastikan setiap warga, terutama yang paling rentan, mendapatkan hak atas layanan kesehatan.

Perjuangan ini menggambarkan betapa kompleks dan menantangnya peran kader seperti Siti Ainul di tengah berbagai kesibukan pribadinya. Para kader harus memahami birokrasi, menjalin jaringan lintas lembaga, dan menavigasi celah sistem yang seringkali tidak ramah bagi warga miskin, dan hal itu perlu dilakukan dengan cepat dan tepat. Semua itu dilakukan demi satu tujuan: memastikan setiap warga, terutama yang paling rentan, mendapatkan hak atas layanan kesehatan.

PENDAMPINGAN MENYELURUH UNTUK ANAK DAN LANSIA

Cerita Ainul hanya satu dari banyak perjuangan para kader perempuan di Kabupaten Tegal yang tergabung dalam program Perempuan Kawal JKN. Mereka adalah ujung tombak dalam memperjuangkan akses layanan kesehatan yang adil, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Setiap kader memiliki kisah unik yang menggambarkan semangat solidaritas dan kepedulian mendalam terhadap sesama.

Masrukha, koordinator kader sekaligus tokoh Fatayat NU Kabupaten Tegal, mengenang salah satu kasus paling berat yang pernah ditanganinya: seorang anak perempuan berusia 12 tahun korban kekerasan seksual. Anak itu mengalami trauma mendalam, menarik diri dari lingkungan, dan menolak berinteraksi. Sang ibu, kebingungan dan merasa sendirian, datang kepada Masrukha untuk meminta bantuan. Dengan empati dan kegigihan, Masrukha mendampingi anak tersebut mendapatkan layanan psikologis, mengatur rujukan ke rumah sakit jiwa, dan menghubungkan dengan dinas perlindungan perempuan dan anak. Lebih dari sekadar urusan administratif, Masrukha menjadi tempat berlindung dan pemulihan emosional bagi si anak dan ibunya.

Sementara itu, Asih Yanti menghadapi tantangan yang berbeda. Ia sering membantu keluarga miskin yang memiliki anak dengan penyakit kronis untuk mendapatkan rujukan ke rumah sakit besar, terutama RSUD dr. Soeselo Slawi atau rumah sakit di Semarang. Tantangan utamanya adalah transportasi dan biaya hidup selama pengobatan. Asih tidak hanya mengurus surat-surat, tetapi juga mencari donatur, berkoordinasi dengan Baznas, Lazisnu, dan organisasi sosial lainnya untuk biaya perjalanan dan kebutuhan selama rawat inap.

Foto 14. Menyerahkan Kartu Keanggotaan JKN Pada Pasien Lansia

Untuk para lansia, pendampingan tidak kalah kompleks. Teti Sumanti mendampingi Muntir, seorang lansia yang terkena stroke dan tinggal sendiri. Ia memastikan rujukan berjalan lancar, menyesuaikan jadwal terapi, bahkan mengantar ke rumah sakit. Nur Afifah juga aktif menjangkau lansia di wilayah pinggiran yang belum memiliki KIS. Ia mencarikan data untuk pendaftaran DTKS, memastikan kepesertaan aktif, dan terus memantau kondisi kesehatannya.

DARI TANTANGAN MENUJU PERUBAHAN

Salah satu tantangan utama dalam kerja pendampingan adalah sistem birokrasi yang lamban dan tidak adaptif. Banyak warga miskin yang sebenarnya layak mendapatkan bantuan, namun tertahan karena belum masuk dalam DTKS atau karena kuota PBID di Kabupaten Tegal

yang terbatas. Kader harus pintar mencari celah—menggunakan SKTM, menghubungi pihak rumah sakit langsung, atau melibatkan media sosial untuk menyuarakan kasus-kasus mendesak.

Para kader juga aktif berjejaring. Mereka membangun hubungan kerja sama dengan kepala desa, TKSK, Puskesmas, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan. Dalam forum Musyawarah Desa atau Musrenbang, mereka menyuarakan kebutuhan warga miskin, mendorong peningkatan kuota PBID, dan memantau realisasi kebijakan jaminan kesehatan. Kerja-kerja ini dilakukan secara sukarela, dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab moral.

Namun, berkat kerja kolektif yang konsisten, perubahan mulai tampak. Koordinasi dengan Dinas Dukcapil kini difasilitasi melalui grup WhatsApp, mempermudah verifikasi data. Proses pencetakan kartu KIS yang sebelumnya memakan waktu kini bisa dipercepat berkat dukungan dari BPJS Kesehatan Cabang Tegal. Bahkan, RSUD dr. Soeselo Slawi kini sering menghubungi Tim Perempuan Kawal JKN jika ada pasien miskin yang tidak punya keluarga pendamping.

Pemda Tegal juga mulai mengalokasikan anggaran untuk bantuan pendampingan pasien miskin, dengan nilai sekitar Rp 90.000 per hari untuk biaya pendampingan rawat inap. Kader pun memanfaatkan sumber daya dari luar sistem formal—seperti Baznas dan lembaga zakat—untuk kasus-kasus mendesak. Dalam banyak situasi, bantuan inilah yang menjadi penentu keselamatan pasien.

Secara tidak langsung, pendampingan ini juga mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem layanan kesehatan. Ketika warga tahu ada yang bersedia mendampingi dan memperjuangkan hak mereka, mereka menjadi lebih berani untuk berobat dan memperjuangkan kesehatannya.

MENJADI PELITA BAGI YANG RENTAN

Bagi para kader perempuan di Kabupaten Tegal, kerja pendampingan bukan sekadar urusan administratif. Ini adalah panggilan hati, bentuk solidaritas sosial, dan upaya menciptakan sistem yang lebih adil. Mereka hadir di tengah masyarakat sebagai jembatan—menghubungkan warga miskin yang tak paham birokrasi dengan sistem layanan yang kadang rumit.

Masrukha mencatat bahwa peran kader adalah membangun sistem pendukung yang lebih manusiawi. Ia secara aktif melatih kader Fatayat NU agar mampu membaca dan menganalisis kebijakan, menulis laporan advokasi, dan menjalin jaringan lintas lembaga. Ainul pun mengungkapkan bahwa kisah Roni memberinya pelajaran penting: bahwa satu tindakan bisa menyelamatkan hidup, dan kehadiran kader bisa menjadi harapan terakhir bagi banyak keluarga.

Teti Sumanti menyebut bahwa keberhasilan bukan semata pada kesembuhan fisik, melainkan pada pemulihan harapan dan keyakinan warga untuk memperjuangkan haknya. Sedangkan bagi Nur Afifah, keberadaan kader seringkali menjadi satu-satunya alasan bagi lansia untuk tetap rutin berobat.

Kabupaten Tegal mungkin belum sempurna. Masih ada kendala data, kebijakan yang belum responsif, dan keterbatasan anggaran. Namun, kerja-kerja kader menunjukkan bahwa perubahan tidak harus menunggu kebijakan besar. Perubahan bisa dimulai dari empati, dari keberanian untuk peduli, dari kesediaan meluangkan waktu dan tenaga untuk yang rentan.

Para kader perempuan ini bukan sekadar pengantar dokumen. Mereka adalah pengantar harapan. Dan selama harapan itu menyala, selama semangat itu hidup, perjuangan akan terus berjalan—menerangi jalan menuju layanan kesehatan yang lebih adil, manusiawi, dan inklusif bagi seluruh warga Kabupaten Tegal.

MENGENAL KADER PEREMPUAN KAWAL JKN KABUPATEN TEGAL

Masrukha

Sebagai Koordinator Perempuan Kawal JKN Kabupaten Tegal, Hj. Masrukha aktif mendampingi pasien dan mendorong perubahan kebijakan layanan kesehatan. Ia pernah mendampingi anak korban kekerasan seksual dengan trauma berat serta membantu pasien operasi bedah mulut yang terhambat prosedur BPJS. Ia rutin menegur rumah sakit yang melanggar hak pasien dan menggagas penggalangan dana bagi warga kurang mampu. Tak hanya itu, Masrukha turut menganalisis kebijakan kesehatan lokal dan memperjuangkan intervensi layanan bersama pemerintah daerah. Ia juga mengorganisir kader Fatayat NU agar lebih efektif dalam aksi pendampingan. Di tengah birokrasi lamban dan keterbatasan dana, ia tetap konsisten memperjuangkan hak-hak kesehatan warga miskin sebagai wujud kepedulian sosial dan komitmennya terhadap keadilan layanan publik.

Siti Ainul Fahmiyah

Siti Ainul Fahmiyah adalah seorang guru dan Wakil Sekretaris PC Fatayat NU Kabupaten Tegal. Ia aktif sebagai kader Perempuan Kawal JKN dan telah mendampingi berbagai kasus kesehatan masyarakat. Salah satu kasus paling berkesan adalah pendampingan Roni, anak lima tahun dengan gangguan pertumbuhan tanpa jaminan kesehatan. Dengan cepat Ainul berkoordinasi dengan perangkat desa, TKSK, dan Dinas Sosial untuk mengurus SKTM dan KIS, meski keluarga belum masuk DTKS. Usahanya membuahkan hasil: KIS disetujui dan perawatan dapat dimulai. Pengalamannya dalam menghadapi berbagai kasus serupa membentuk tekad kuat dalam memastikan akses kesehatan yang setara bagi masyarakat miskin. Ainul percaya bahwa perjuangan ini adalah bentuk nyata kepedulian sosial dan panggilan kemanusiaan sebagai kader dan pendidik.

Teti Sumanti

Teti Sumanti adalah Wakil Ketua PAC Fatayat NU Pangkah sekaligus kader Perempuan Kawal JKN yang berdedikasi di lini terdepan pelayanan masyarakat. Ia mendampingi pasien dari kalangan miskin, termasuk ibu hamil dengan hepatitis yang awalnya menolak BPJS, berujung kehilangan bayinya. Ia juga menangani pasien TBC di Desa Grobog Wetan hingga sembuh, serta mengintervensi kasus ibu hamil berisiko tinggi yang hampir tak tertangani karena abai bidan desa. Teti juga membantu pasien dengan

penyakit kronis, seperti gangguan saraf dan gagal ginjal, termasuk mengurus akses cuci darah. Ia berperan bukan hanya dalam aspek administratif, tetapi juga meyakinkan pasien agar mau berjuang untuk kesehatannya. Bagi Teti, pendampingan adalah tentang keberanian, empati, dan advokasi di tengah keterbatasan sistem.

Lutfiyah Hasan

Sebagai kader Perempuan Kawal JKN, Lutfiyah Hasan telah banyak mendampingi pasien miskin dalam mengakses layanan kesehatan. Salah satu pengalaman mendalam baginya adalah membantu Ahmad Rifco, pasien lever dan TB paru, yang meninggal setelah 11 hari perawatan meski upaya percepatan administrasi telah dilakukan. Lutfiyah bersama TKSK dan operator desa mencoba menghapus beban biaya Rp 10,5 juta, namun sang ibu pasien memilih menyudahi perdebatan. Momen tersebut menjadi refleksi mendalam baginya tentang pentingnya akses cepat layanan kesehatan. Lutfiyah juga terlibat dalam reaktivasi KIS dan kasus pasien lain dengan hambatan administratif. Dari pengalamannya, ia belajar tentang arti kesabaran, ikhlas, dan nilai dari kehadiran kader dalam memperjuangkan hak hidup yang layak bagi masyarakat miskin.

Asih Yanti

Asih Yanti adalah guru dan kader Perempuan Kawal JKN yang telah memperjuangkan ribuan warga miskin untuk mendapat akses JKN-KIS. Ia sukses mengusulkan 600 peserta PBI pusat dan 50 melalui PBI APBD berkat kolaborasinya dengan Dinsos dan pemerintah desa. Salah satu kisah mengharukan adalah pendampingan anak bernama Arfa yang butuh operasi tanpa BPJS aktif. Berkat upaya kader dan kerja sama dengan Baznas dan rumah sakit, biaya tertutupi. Asih kerap menghadapi kendala teknis, seperti NIK tidak sinkron dan BPJS nonaktif mendadak saat kontrol. Meski regulasi ketat dan kuota terbatas, ia tetap gigih memperjuangkan layanan, terutama dalam isu stunting yang kini menjadi fokus Fatayat NU. Bagi Asih, kerja kader adalah perlawanan sunyi untuk keadilan layanan kesehatan.

Ulpah Rosidah

Sebagai kader Perempuan Kawal JKN dan guru, Ulpah Rosidah aktif mendampingi pasien menghadapi berbagai kendala layanan kesehatan. Ia membantu Nok Anisah yang rawat inap akibat gangguan lambung dengan kendala BPJS tidak aktif. Ulpah mengurus aktivasi hingga biaya tertanggung. Ia juga menangani Sumarti, pasien epilepsi yang dipulangkan lebih awal tanpa penjelasan, dan berhasil mendapatkan klarifikasi dari RSUD Soesilo. Ulpah rajin sosialisasi manfaat BPJS, pengecekan status aktif peserta, serta mempelajari mekanisme aktivasi melalui Dinkes. Ia percaya bahwa edukasi adalah bagian penting dari advokasi. Lewat keterlibatannya, Ulpah membuktikan bahwa kader tidak hanya menjadi jembatan administratif, tapi juga penghubung harapan masyarakat miskin untuk tetap sehat dan mendapat layanan yang layak.

Nur Afifah

Nur Afifah adalah tenaga kependidikan dan Wakil Ketua PC Fatayat NU Tegal sekaligus Staf Data Perempuan Kawal JKN. Ia aktif membantu masyarakat, terutama dalam hal kepesertaan BPJS. Ia membantu calon jemaah haji mengurus BPJS dan mengadvokasi pasien ODGJ untuk mendapatkan perawatan di RSUD. Salah satu pencapaian besarnya adalah saat berhasil mengajukan Bantuan Tidak Tunai (BTT) untuk anak penderita bronchitis sehingga bisa dirawat selama 10 hari tanpa biaya. Kasus yang sering ia tangani terkait BPJS tidak aktif dan proses mutasi kepesertaan yang rumit. Meski birokrasi lambat dan penuh tantangan, Afifah tetap mendampingi sampai pasien mendapat hak layanan kesehatan. Bagi Nur, keterlibatan dalam program ini mengajarkan arti solidaritas dan perjuangan tanpa pamrih demi keadilan kesehatan bagi semua.

KISAH KADER

PEREMPUAN KAWAL JKN

KABUPATEN PATI

MENJANGKAU MEREKA YANG TERLUPAKAN DI KABUPATEN PATI

MENDAMPINGI PASIEN HIV DAN ODGJ

Di sebuah dusun terpencil di Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, seorang anak perempuan berusia tujuh tahun berjuang melawan virus HIV yang diwarisi tanpa pernah diminta. Ia tertular dari ibunya, seorang mantan Pekerja Seks Komersial yang telah meninggal dunia. Kini, ia hidup bersama neneknya dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Ketika pertama kali ditemui oleh Hariyati, kader Fatayat NU setempat, kondisi anak itu sangat memprihatinkan: mulutnya dipenuhi jamur, bibirnya pecah-pecah, ia batuk berat, mengalami sesak napas, kehilangan nafsu makan, dan rambutnya mulai rontok. Ironisnya, meskipun kondisi anak itu diketahui oleh warga dan perangkat desa, tidak ada satupun pihak yang mengambil inisiatif untuk menolongnya.

Tak tinggal diam, Hariyati memulai langkah kecil dengan mendampingi pasien ke layanan kesehatan. Ia menjalin komunikasi dengan berbagai pihak: mulai dari pemerintah desa, kecamatan, dinas kesehatan, Puskesmas, rumah sakit daerah, hingga lembaga sosial seperti LAZISNU. Hariyati juga melakukan kunjungan rutin ke rumah pasien untuk memastikan perkembangan kesehatannya, sekaligus memfasilitasi jadwal pengobatan dan pemeriksaan rutin ke Puskesmas serta RSUD setiap dua minggu sekali. Untuk membantu biaya transportasi dan pengobatan, Hariyati mengoordinasikan penggalangan bantuan dari LAZISNU serta mengusahakan peran aktif pemerintah desa.

Perjuangan Hariyati membuahkan hasil. RSUD akhirnya memberikan perawatan intensif, dan setelah melalui berbagai tahapan administrasi, pasien akhirnya terdaftar sebagai penerima BPJS PBI. Kini, anak tersebut menunjukkan perkembangan signifikan—ia sudah kembali ceria dan bahkan mulai bersekolah di kelas satu SD. Pendampingan Hariyati membuktikan bahwa ketika negara dan masyarakat abai, peran kader mampu menjadi jembatan harapan bagi mereka yang terpinggirkan.

Foto 16. Mengunjungi rumah pasien dampingan

Sementara itu, Nur Hidayah, kader Fatayat NU lainnya, menghadapi tantangan berbeda: mendampingi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tak hanya mengalami keterasingan sosial, tetapi juga terhambat aksesnya pada hak-hak dasar sebagai warga negara. Salah satunya adalah Bu Tami, seorang ODGJ yang selama bertahun-tahun tidak memiliki identitas kependudukan. Upaya perekaman e-KTP-nya penuh hambatan: petugas kecamatan menolak melakukan perekaman karena pernah gagal sebelumnya, sementara perangkat desa pun awalnya enggan mendampingi proses tersebut. Nur tak patah semangat. Ia terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, Babinsa, Babinkamtibmas, hingga Puskesmas agar Bu Tami akhirnya bisa menjalani perekaman e-KTP dan memiliki identitas resmi yang menjadi syarat dasar untuk mendapatkan layanan kesehatan dan bantuan sosial.

Selain Bu Tami, Nur juga mendampingi seorang gadis muda dengan gangguan jiwa yang ditelantarkan orang tuanya setelah bercerai dan kini tinggal bersama saudaranya. Gadis tersebut sering mengalami histeria hingga membuat tetangga resah. Atas usulan RT/RW, pihak keluarga akhirnya membawa pasien ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Meski pemerintah desa telah membuat surat pengantar untuk keringanan biaya, pihak RSJ menolaknya. Karena tidak memiliki BPJS, keluarga terpaksa membayar seluruh biaya perawatan sendiri. Belum seminggu dirawat, biaya yang harus dibayar sudah mencapai Rp5 juta. Hal ini memicu kepanikan dan kebingungan dari pihak keluarga.

Melihat kondisi tersebut, Nur Hidayah kembali bergerak. Ia membantu keluarga untuk mengupayakan pendaftaran BPJS KIS dari APBD. Namun kendala muncul karena pasien tidak memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan KK. Nur tak menyerah. Ia mencari bantuan

ke LAZISNU dan BAZNAS. LAZISNU menyanggupi untuk membantu dana perawatan, namun pemerintah desa akhirnya memutuskan untuk menanggung biaya pengobatan dari dana desa sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warganya. Walau biaya perawatan sudah ditanggung, proses pendaftaran BPJS KIS PBI tetap terus diupayakan oleh Nur agar pasien bisa mendapatkan layanan kesehatan berkelanjutan.

Cerita Hariyati dan Nur Hidayah mencerminkan realitas keras yang dihadapi kelompok marginal seperti anak dengan HIV dan ODGJ. Namun lebih dari itu, cerita ini adalah potret perjuangan kader perempuan yang bekerja melampaui tugas formal, hadir di ruang-ruang kosong yang ditinggalkan oleh sistem dan masyarakat. Mereka adalah penghubung harapan dan perubahan, yang dengan ketekunan dan kasih sayang, menghidupkan kembali martabat dan akses hidup layak bagi yang kerap dilupakan.

KERJA NYATA DAN KEPERCAYAAN YANG TUMBUH

Pada masa awal program pendampingan, tak sedikit pihak yang meragukan kemampuan Fatayat NU dalam menjalankan kerja-kerja advokasi layanan kesehatan. Bahkan dari pihak pemerintah sendiri muncul keraguan. *“Siapa sih Fatayat?”* begitu ungkapan skeptis yang dilontarkan, menandai belum adanya rekam jejak yang meyakinkan bahwa organisasi ini mampu mengawal akses layanan kesehatan bagi kelompok miskin dan marjinal. Pengalaman menunjukkan bahwa pendampingan JKN bukan perkara mudah, apalagi jika dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil yang sebelumnya belum dikenal luas di lingkaran birokrasi kesehatan.

Namun para kader Fatayat NU Pati menjawab semua keraguan itu bukan dengan janji, melainkan kerja nyata. Kasus-kasus berat mereka dampingi satu per satu—dari pasien yang kesulitan mengakses rumah sakit, hingga keluarga yang kebingungan mengurus administrasi. Evaluasi dan refleksi rutin dilakukan, jejaring lintas lembaga dibangun perlahan tapi pasti, dan komunikasi dijaga agar tetap terbuka. Semangat mereka tidak surut meski menghadapi birokrasi yang lambat, minimnya data, atau bahkan stigma dari masyarakat.

Hasilnya mulai terlihat. Menurut Bonaventura Andry Sigmanda, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Pati, kerja kader Fatayat sejalan dengan visi BPJS.Pernyataan ini menjadi tonggak penting yang menandai tumbuhnya kepercayaan.

> **Fatayat NU dan kadernya memiliki visi dan misi yang selaras dengan kami BPJS Kesehatan Kabupaten Pati, sehingga kami memposisikan mereka sebagai mitra strategis dalam sosialisasi dan edukasi ke masyarakat.**
>
> Bonaventura Andry Sigmanda, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Pati.

Kepercayaan itu kemudian dituangkan dalam berbagai bentuk kerja sama formal dan informal. Fatayat NU Pati kini memiliki nota kesepahaman (MoU) dengan Bupati Pati dan BPJS Kesehatan Pati untuk pendampingan kelompok miskin marjinal. Dukungan juga datang dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), yang mempermudah proses administrasi bagi pasien dampingan. Untuk memfasilitasi koordinasi, para kader membentuk grup WhatsApp yang melibatkan perwakilan BPJS, Dinas Sosial, RSUD Soewondo, Dukcapil, dan pemerintah desa. Bahkan Pak Bona dari BPJS Kesehatan bersedia membantu di luar jam kerja, termasuk menjembatani kasus-kasus genting ke pihak rumah sakit.

Foto 17. MoU dengan BPJS Pati

Pelayanan pun semakin cepat dan efisien. Misalnya, jika perlu konsultasi dengan Dukcapil, kader cukup menghubungi kontak person dan akan langsung dilayani tanpa antre. Pemerintah desa juga mulai terbuka terhadap kerja-kerja pendampingan, termasuk berbagi data DTKS dan bekerja sama dengan para RT serta bidan desa. Kolaborasi ini berkontribusi pada pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Pati yang mencapai 92,26% pada akhir 2024.

Salah satu capaian luar biasa adalah kolaborasi dengan Yayasan RSI Pati. Kader Nur Hidayah melakukan pendekatan langsung kepada Direktur RSI dan berhasil mengusulkan alokasi dana CSR untuk membayarkan iuran BPJS Mandiri warga kurang mampu. Awalnya hanya 30 orang,

namun karena antusiasme tinggi, kuota ditambah menjadi 50. Meski akhirnya hanya 22 orang yang berhasil didaftarkan karena kendala data dan tunggakan, mereka kini mendapat layanan IGD dan dokter gigi secara gratis melalui skema BPJS Mandiri hasil CSR. Mereka juga tergabung dalam grup komunikasi yang difasilitasi pihak rumah sakit.

Semua ini menunjukkan bahwa kerja pendampingan yang dilakukan dengan hati akan menghasilkan kepercayaan yang tulus pula. Fatayat NU Pati kini tak hanya dikenal, tapi juga dipercaya. Mereka bukan sekadar perpanjangan tangan organisasi, melainkan telah menjadi jembatan nyata antara sistem dan rakyat yang kerap terpinggirkan.

MENJANGKAU MEREKA YANG SERING DILUPAKAN

Kader Fatayat NU di Kabupaten Pati telah menunjukkan bahwa kerja pendampingan bukan sekadar soal akses layanan kesehatan, melainkan tentang merawat kemanusiaan. Mereka hadir dengan ketulusan hati, menyentuh kehidupan kelompok miskin dan marjinal yang sering terabaikan. Dalam menjalankan tugas, mereka tak hanya menghadapi persoalan administratif atau teknis, tetapi juga berhadapan langsung dengan cerita-cerita pilu dan sistem yang kerap tak berpihak.

Tantangan demi tantangan tidak membuat mereka surut. Sebaliknya, pengalaman menghadapi penolakan, keraguan, hingga stigma justru memperkuat komitmen mereka. Mengurus pasien tanpa identitas, memperjuangkan hak layanan untuk ODGJ, menggalang dukungan dari lembaga zakat, dan membangun kepercayaan di tengah ketidakpastian adalah bagian dari keseharian mereka. Di balik semua itu, ada kesabaran dan keyakinan yang tak tergoyahkan.

> **“Kami ini bukan siapa-siapa, tapi kami percaya, kalau kita bergerak, Allah mudahkan jalannya.”**
>
> Kader Perempuan Kawal JKN

Bagi para kader, keberhasilan bukan semata-mata diukur dari jumlah pasien yang terbantu, tapi dari seberapa dalam mereka menyentuh hati dan mengubah nasib sesama. Kini, mereka bukan sekadar pelaksana tugas organisasi, melainkan jembatan harapan di tengah sistem yang kerap tak memberi jalan. Keberpihakan mereka nyata: hadir tanpa diminta, membantu tanpa pamrih, dan terus berjalan demi kemanusiaan.

MENGENAL KADER PEREMPUAN KAWAL JKN KABUPATEN PATI

Guruh Sri Susanti

Sebagai Koordinator Kader Sehat Fatayat NU Kabupaten Pati, Guruh aktif dalam sosialisasi dan audiensi lintas stakeholder. Ia terlibat langsung dalam pendampingan kasus berat, salah satunya pasien yang salah diagnosis di tiga rumah sakit berbeda. Mulai dari dugaan syaraf kejepit, patah tulang, hingga akhirnya terdiagnosis gagal ginjal dan harus menjalani cuci darah. Guruh mengkoordinasikan layanan lintas rumah sakit dan BPJS, memastikan pasien mendapatkan perawatan hingga rujukan ke RS Moewardi. Komitmennya menunjukkan peran kader tak hanya sebagai pendamping, tapi juga penghubung penting antar-lembaga untuk menjamin akses kesehatan yang tepat bagi masyarakat.

Haryati

Haryati adalah Wakil Ketua IV Fatayat NU Pati dan guru sekolah swasta yang aktif mendampingi berbagai pasien, termasuk seorang anak dengan HIV/AIDS. Ia berperan besar dalam memastikan hak kesehatan anak tersebut terpenuhi, mulai dari mengurus administrasi kependudukan, kepesertaan JKN, kontrol rutin, bantuan transportasi, hingga advokasi ke berbagai pihak—mulai dari desa, puskesmas, dinas sosial, hingga DPRD. Haryati menjadi penggerak penting dalam membangun kolaborasi dan memastikan layanan kesehatan inklusif dan tanpa stigma. Konsistensinya mendampingi kasus yang kompleks menunjukkan keberanian dan komitmen tinggi terhadap kemanusiaan.

Zulikah

Sebagai Dewan Kehormatan Fatayat NU Pati dan guru sekolah swasta, Zulikah dikenal karena kepeduliannya dalam mendampingi pasien Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mengalami kecelakaan. Ia memastikan pasien mendapatkan perawatan lanjutan di RSI dan melibatkan keluarganya, termasuk suaminya, dalam proses pendampingan. Ia juga aktif membantu pasien dengan berbagai keluhan kronis, membawa mereka ke rumah sakit lokal hingga rujukan ke RSUP Semarang menggunakan layanan mobil umat LAZISNU. Perannya menunjukkan pentingnya kehadiran kader yang tidak hanya peduli, tetapi juga mampu menjembatani sistem layanan yang kompleks.

Sri Murwati

Sebagai Wakil Sekretaris I Fatayat NU Pati dan guru sekolah swasta, Sri Murwati aktif mendampingi pasien untuk layanan rutin ke fasilitas kesehatan di Pati dan Semarang. Ia membantu masyarakat menyelesaikan persoalan seputar kepesertaan JKN, termasuk pengajuan PBI, pembaruan data, dan penyelesaian tunggakan iuran. Selain itu, Sri juga terlibat dalam penanganan kasus anak dan balita stunting, memastikan mereka mendapatkan akses layanan yang sesuai. Ketekunan dan kesabarannya dalam menghadapi persoalan administrasi menjadi kekuatan utama dalam mendampingi warga yang tidak familiar dengan sistem layanan kesehatan.

Rif'a Nasihatin

Rif'a berperan sebagai kader yang fokus pada edukasi dan sosialisasi, khususnya kepada ibu hamil. Ia menekankan pentingnya mendaftar sebagai peserta JKN sejak awal, baik melalui jalur mandiri maupun PBI. Ia juga rutin mengingatkan keluarga untuk mendaftarkan anak-anak mereka dalam sistem jaminan kesehatan. Peran Rif'a menonjol dalam upaya preventif—memastikan bahwa masyarakat terlindungi sejak dini dan paham tentang hak-hak mereka dalam mengakses layanan kesehatan. Dengan pendekatan yang komunikatif dan aktif, Rif'a membangun kesadaran pentingnya perlindungan kesehatan di tingkat keluarga.

Nur Hidayah

Nur Hidayah adalah guru, penyuluh agama, dan dewan kehormatan Fatayat NU Pati. Meski sempat ragu karena kompleksitas birokrasi, ia menjalani peran pendamping dengan penuh dedikasi. Ia aktif mengkoordinasikan bantuan lintas instansi dan mendampingi warga yang kesulitan memahami prosedur layanan kesehatan. Perjuangannya memberinya kepuasan batin karena merasa lebih bermanfaat bagi orang lain. Meski tidak memiliki status sosial tinggi, ia menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi agen perubahan yang membantu masyarakat mengakses hak dasarnya. Ia menjalani pendampingan sebagai bentuk ibadah sosial yang bermakna.

Adiningtyas

Adiningtyas, akrab disapa Dining, adalah koordinator bidang kesehatan Fatayat NU Pati sekaligus staf data program Perempuan Kawal JKN. Ia bertugas mengelola data pendampingan dari seluruh kader dan melaporkannya kepada koordinator, PP Fatayat, serta AKATIGA. Perannya sangat vital dalam memastikan setiap kasus terdokumentasi dengan baik dan menjadi bahan advokasi kebijakan. Dining juga berkontribusi dalam pemetaan masalah dan capaian pendampingan yang bisa ditindaklanjuti bersama. Di balik layar, ia menjaga kesinambungan program dengan data yang akurat dan menjadi penghubung penting antara kerja .

KISAH KADER

PEREMPUAN KAWAL JKN

KABUPATEN KEDIRI

MENGAWAL PERBAIKAN AKSES LAYANAN KESEHATAN DI KEDIRI

KERJA BERSAMA UNTUK PENGOBATAN TANIA

Tania masih bayi saat ibunya menemukan sebuah titik kecil di dekat dadanya. Awalnya dianggap sepele, titik itu membesar, berubah warna menjadi merah keunguan, dan menyebabkan rasa sakit. Ketika Tania berusia enam bulan, keluarganya membawanya ke RSUD SLG Kediri dan kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Diagnosa dokter menghantam hati keluarga: Tania mengidap kanker pembuluh darah. Harapan pupus karena rumah sakit tak memiliki alat laser khusus. Satu-satunya tempat yang memiliki alat itu adalah Surabaya Skin Centre (SSC)—fasilitas swasta di luar jangkauan BPJS. Satu sesi terapi laser menelan biaya empat juta rupiah dan harus dilakukan berkala. *"Kami tidak punya uang untuk itu,"* ujar sang ibu pilu.

Dalam kebuntuan itu, muncul sosok Fatimatuz Zahro, kader Fatayat NU dalam program Perempuan Kawal JKN. Ia tidak hanya hadir sebagai pendengar, tetapi juga sebagai penggerak. Dengan cekatan, ia membantu keluarga Tania mendaftar JKN-PBI, mengurus administrasi yang rumit, dan mulai mencari solusi atas pengobatan yang tidak dijamin BPJS. Bersama jaringan Fatayat NU Kediri, mereka bergerak cepat: menggalang dana dari komunitas lokal, jaringan internal organisasi, dan menjalin kerja sama dengan mitra sosial seperti AKATIGA. Dukungan demi dukungan pun berdatangan. Dalam hitungan minggu, Tania bisa menjalani enam kali tindakan laser. Ibunya penuh syukur dan mengungkapkan rasa terima kasih mendalam kepada Fatayat.

> **“Kalau bukan karena Fatayat, saya tidak tahu bagaimana nasib anak saya.”**
>
> Ibu Pasien Tania, Kediri

Foto 19. Pendampingan pada keluarga pasien Tania

BERAGAM TANTANGAN UNTUK BEROBAT

Tania bukan satu-satunya. Di balik cerita ini, ada ratusan kisah serupa yang dihadapi kader Fatayat NU Kediri setiap harinya. Mereka menjadi penghubung antara sistem layanan kesehatan dan warga yang tidak paham bagaimana cara mengaksesnya. Mereka menghadapi tantangan mulai dari masalah administratif, keterbatasan transportasi, hingga stigma sosial yang menghambat upaya pengobatan.

Padahal, secara angka, cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Kediri tergolong tinggi. Pada Agustus 2024, UHC mencapai 96,84%. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Banyak warga tetap kesulitan mendapatkan layanan karena kartu JKN mereka nonaktif, tidak memahami prosedur pendaftaran, atau mengalami kendala saat hendak pindah fasilitas kesehatan.

Siti Uswatun Hasanah mengenang kisah seorang ibu hamil yang datang ke rumah sakit untuk menjalani operasi sesar. Saat itu, prosedur harus dilakukan segera karena kondisi kandungan darurat. Namun pelayanan ditolak karena kepesertaannya di BPJS tidak aktif. Dengan sigap, kader Siti Qoyumi turun tangan membantu mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan proses masuk ulang ke DTKS. Setelah melalui birokrasi yang rumit, ibu tersebut akhirnya bisa menjalani operasi dan selamat.

Nur Atika Oktafia punya kisah lain. Ia mendampingi seorang lansia difabel yang ingin pindah faskes ke tempat yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Secara administratif, proses ini berbelit. Namun Atika tidak menyerah. Ia mendekati Dinas Sosial dan BPJS secara persuasif dan berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Kasus serupa juga dialami oleh Yanti

Fitriyawanti, yang mendampingi seorang anak yatim dengan sindrom nefrotik. Karena dokumen kependudukannya masih di luar kota, anak ini kesulitan berobat. Yanti pun bergerak cepat mengurus pemindahan Kartu Keluarga dan menjembatani koordinasi antara Dinsos, Dinkes, dan BPJS.

Foto 20. Kunjungan dan pendampingan pa Jamian

Tantangan di lapangan sering kali lebih dari sekadar administratif. Sari, pasien gagal ginjal, harus bolak-balik ke rumah sakit yang berjarak jauh dari rumahnya. Meskipun kader berhasil mengalihkan statusnya ke JKN-PBI, biaya transportasi tetap menjadi beban berat. Dalam kasus lain, Pak Jamian, penderita kusta, mengalami isolasi sosial dari lingkungan sekitar. Ia bukan hanya butuh pengobatan, tapi juga pendampingan moral dan sosial. Kader mendampingi beliau dengan empati dan ketulusan, hingga akhirnya Pak Jamian mendapat perawatan yang layak dan kembali mendapat pengakuan sosial.

KADER SEBAGAI PENGGERAK PERUBAHAN

Tania bukan satu-satunya. Di balik cerita ini, ada ratusan kisah serupa yang dihadapi kader Fatayat NU Kediri setiap harinya. Mereka menjadi penghubung antara sistem layanan kesehatan dan warga yang tidak paham bagaimana cara mengaksesnya. Mereka menghadapi tantangan mulai dari masalah administratif, keterbatasan transportasi, hingga stigma sosial yang menghambat upaya pengobatan.

Sejak 2021, Fatayat NU Kediri memperkuat kerja mereka dengan menandatangani MoU bersama Pemerintah Kabupaten Kediri. Mereka membangun koordinasi lintas sektor, dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, BPJS, hingga rumah sakit. Inovasi sosial pun dilakukan. Dalam setiap pengajian Fatayat, para kader menyisipkan sesi penyuluhan JKN dan membuka ruang konsultasi. Mereka meminta jamaah membawa fotokopi Kartu Keluarga dengan catatan kecil di belakangnya: keluhan dan kebutuhan layanan kesehatan. Informasi itu kemudian dikompilasi, dianalisis, dan dijadikan dasar intervensi dan advokasi.

Dampak dari kerja para kader sangat nyata. Ribuan warga yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan kini tercatat sebagai peserta aktif JKN-PBI. Pasien-pasien dengan penyakit kronis seperti gagal ginjal, kanker, atau kelainan metabolik bisa kembali mendapatkan perawatan rutin tanpa hambatan biaya. Rumah sakit yang sebelumnya tertutup kini mulai terbuka terhadap kehadiran kader. Pemerintah daerah juga lebih cepat dalam merespons kasus darurat dengan penerbitan SKTM atau percepatan proses DTKS.

Kader tidak hanya membantu pasien, tetapi juga menciptakan ekosistem pendukung. Biaya transportasi, akomodasi, hingga kebutuhan logistik lainnya seringkali ditutupi lewat kerja sama dengan komunitas lokal dan lembaga filantropi. Dari sinilah terbentuk jaringan solidaritas sosial yang saling menguatkan. Kasus-kasus yang sebelumnya tidak pernah terdata, kini menjadi bagian dari data kebijakan karena pelaporan dan dokumentasi yang sistematis dari kader.

Bersama mitra seperti AKATIGA, para kader juga menyusun pembelajaran dari lapangan menjadi bahan rekomendasi kebijakan. Mereka merumuskan model pendampingan yang adaptif dan dapat direplikasi di wilayah lain. Dari inisiatif lokal, lahirlah model perubahan sosial yang relevan dan berkelanjutan.

Bagi para kader Fatayat NU Kediri, menjadi pendamping masyarakat bukan sekadar aktivitas sukarela. Ini adalah jalan pengabdian. *"Kadang saya lelah,"* aku Siti Uswatun Hasanah. *"Tapi ketika pasien sembuh, saya merasa semua lelah terbayar."*

Etik Indah Yati, Koordinator Kader Perempuan Kawal JKN di Kediri, menyebut peran kader sebagai bentuk nyata dari perjuangan mewujudkan keadilan sosial. Dia percaya bahwa keadilan tidak datang begitu saja dari atas. Ia harus diperjuangkan dari bawah, dari pengalaman warga, dari suara-suara yang sering tak terdengar.

> **“Kami bukan dokter, bukan pejabat, tapi kami jembatan antara masyarakat dan haknya. Kami percaya negara harus hadir bagi rakyat kecil. Tapi kehadiran itu harus dijemput. Dan kami yang menjemputnya.”**
>
> Etik Indah Yati,Koordinator Kader Perempuan Kawal JKN di Kediri

Para kader menyadari bahwa tugas mereka lebih dari sekadar menyelesaikan kasus individual. Mereka bergerak dengan visi sistemik: mengubah cara masyarakat memandang layanan kesehatan dan mendorong negara untuk hadir lebih adil. Dalam proses itu, mereka belajar dari setiap kasus, membangun jejaring yang luas, dan menguatkan kesadaran kolektif di tengah masyarakat.

Kerja mereka seringkali dilakukan tanpa imbalan. Bahkan tak jarang mereka menghadapi resistensi dari aparat atau institusi layanan. Namun mereka terus bergerak, digerakkan oleh rasa empati, keimanan, dan keyakinan bahwa perubahan sosial dimulai dari hal-hal kecil.

MENGENAL KADER PEREMPUAN KAWAL JKN KABUPATEN KEDIRI

Etik Indah Yati

Etik adalah Koordinator Kader Perempuan Kawal JKN Kediri. Awalnya bukan bagian dari Fatayat, Etik mulai aktif saat pandemi dengan membuka posko kesehatan di rumahnya. Kepeduliannya menarik perhatian Ketua Pengurus cabang Fatayat yang juga Wakil Bupati Kediri yang kemudian menjembatani kader dengan BPJS, Dinas Kesehatan, dan perangkat desa. Salah satu keberhasilannya adalah mengkoordinasikan tim untuk mendorong pendaftaran PBID ratusan warga. Etik dikenal karena kemampuannya membangun jejaring lintas sektor dan memperjuangkan layanan kesehatan yang adil, terutama bagi masyarakat miskin. Meski sibuk sebagai ibu rumah tangga, ia tetap aktif menjadi penggerak advokasi dan perubahan sosial berbasis komunitas.

Yuliana Wahyuni

Yuliana menjabat sebagai staf data di program Perempuan Kawal JKN Kediri. Ia merekap dan mengelola data pengajuan JKN-PBI dari kader, serta menyiapkan laporan bulanan terkait capaian, kendala, dan jumlah warga yang dibantu. Ia memastikan data tersampaikan ke Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan untuk ditindaklanjuti. Perannya penting dalam membangun basis data yang akurat untuk pelaporan dan pembelajaran bersama AKATIGA. Ia juga menyebarkan informasi terkini kepada kader terkait prosedur administrasi layanan kesehatan. Selain menjadi bendahara PAC Fatayat, ia juga aktif berwirausaha dan menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Yuliana menjadi penghubung penting antara kerja lapangan dan sistem administratif dalam upaya memperluas akses layanan kesehatan.

Fatimatuz Zahro

Fatim adalah Wakil Sekretaris salah satu PAC Fatayat dan kader yang aktif mendampingi warga miskin mengakses layanan kesehatan. Salah satu kisah paling membekas adalah bantuannya untuk Tania, balita penderita kanker pembuluh darah. Ia mengurus JKN-PBI dan menghimpun donasi agar Tania tetap bisa menjalani pengobatan. Fatim juga mendampingi pasien thalasemia dan korban kecelakaan dalam mengakses hak-haknya, termasuk layanan Jasa Raharja. Ia aktif dalam advokasi kebijakan bersama Dinas Kesehatan untuk memperkuat perlindungan kesehatan bagi kelompok

rentan. Meski juga menjalankan peran domestik sebagai ibu rumah tangga, Fatim tetap aktif memperjuangkan keadilan kesehatan dengan penuh empati dan semangat kolaborasi.

Yanti Fitriyawanti

Yanti adalah wiraswasta dan pengurus salah satu PAC di Kediri. Ia menjadi kader dengan dedikasi tinggi dalam mendampingi pasien miskin. Ia pernah membantu anak disabilitas mendapatkan kursi roda dan terapi tambahan, serta mendampingi pasien kanker kandungan untuk mengakses layanan Jamkesda. Yanti menghadapi tantangan birokrasi dan keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai hak atas layanan kesehatan. Untuk mengatasi hal itu, ia membangun jejaring lintas institusi dan komunitas agar lebih banyak warga miskin bisa dibantu. Ketekunan dan kegigihannya menjadikan Yanti sosok kader yang dipercaya masyarakat serta mampu memberikan solusi nyata di tengah keterbatasan sistem layanan publik.

Siti Qoyumi

Siti Qoyumi adalah kader yang aktif membantu masyarakat mengakses layanan kesehatan. Ia pernah mendampingi ibu hamil bernama Ani yang harus operasi caesar, tetapi tak memiliki biaya. Ia mengurus pengajuan Jamkesda agar biaya persalinan ditanggung pemerintah. Ia juga pernah menghadapi kasus penderita gagal ginjal yang kesulitan akses cuci darah. Selain mendampingi orang lain, ia mengalami langsung tantangan sistem ketika mendapati ketidaksesuaian data medis pasca-operasi tulang belakang. Pengalaman pribadinya memperkuat komitmennya dalam mengedukasi masyarakat tentang hak pasien. Siti kini lebih aktif menyuarakan pentingnya akses informasi kesehatan bagi warga, terutama kelompok miskin dan rentan.

Nur Atika Oktafia

Nur Atika adalah ibu rumah tangga sekaligus pengurus Bidang Hukum, Politik, dan Advokasi di PAC Fatayat Kediri. Ia aktif mendampingi kelompok difabel mengakses layanan kesehatan. Salah satu kasus yang ia tangani adalah Mertyn, pengguna kursi roda yang menderita ambeien parah dan menunggak iuran BPJS. Ia membantu pengajuan JKN-PBI agar Mertyn tetap mendapat pengobatan. Nur Atika juga membantu pasien lain, termasuk ibu

hamil difabel dengan kehamilan berisiko tinggi. Ia menjalin koordinasi dengan BPJS, Dinsos, dan pemerintah desa untuk memastikan warga dampingan mendapatkan haknya. Dengan pendekatan empatik dan gigih, ia menjadi pembela hak-hak difabel di tingkat akar rumput.

Siti Uswatun Hasanah

Siti Uswatun adalah guru dan pengurus bidang Ekonomi di PAC Fatayat Kediri. Ia dikenal karena ketekunannya mendampingi pasien dengan penyakit kronis dan warga yang terkendala administrasi JKN. Salah satu kisahnya adalah mendampingi Sari, pasien gagal ginjal yang awalnya menolak cuci darah. Dengan pendekatan sabar, ia berhasil meyakinkan pasien menjalani perawatan. Ia juga membantu dua anak penderita lupus dan bocor ginjal yang kehilangan bantuan sosial. Ia mengadvokasi ke Dinas Sosial hingga hak mereka dikembalikan. Momen paling mengharukan baginya adalah saat mendampingi pasien katarak yang akhirnya bisa melihat kembali. Siti menunjukkan bahwa kerja kader mampu mengubah hidup seseorang secara nyata.

KISAH KADER

PEREMPUAN KAWAL JKN

KABUPATEN
BLITAR

BERKHIDMAT UNTUK AKSES KESEHATAN ANAK DI BLITAR

LUKA OI DAN SUARA KEMANUSIAAN DI KABUPATEN BLITAR

Oi masih duduk di bangku kelas enam SD ketika dunia yang seharusnya ia nikmati dengan bermain dan belajar, runtuh seketika. Di usia 12 tahun, ia mengalami kekerasan paling kelam yang bisa menimpa seorang anak: diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Dalam kondisi hamil enam bulan, Oi tetap tinggal di rumah petak sempit bersama nenek, tante, dan anggota keluarga lainnya—total sembilan orang dalam satu atap. Tak ada ruang bagi pulih, tak ada pelindung. Yang tersisa hanya diam dan trauma.

Ketika kasus ini terungkap, para kader Fatayat NU Kabupaten Blitar bergerak. Yuha, koordinator kader, langsung turun tangan. Ia tak sendiri. Bersama LKP3A Fatayat NU, mereka mendampingi Oi dalam setiap tahapan: dari pemulihan psikologis, dukungan hukum, hingga memastikan Oi tetap dapat mengikuti ujian sekolah secara daring. Para kader bekerja sama dengan bidan desa untuk memantau kondisi kehamilan Oi yang tergolong berisiko tinggi. Pendampingan dilakukan bukan sekadar rutinitas, tapi sebuah upaya untuk mengembalikan martabat seorang anak.

Tidak mudah mendapatkan KIS PBI bagi Oi. Kader harus melobi berbagai pihak, bahkan hingga ke Dinas Kesehatan, demi memastikan ia bisa melahirkan dengan aman. Tiga bulan setelah pendampingan dimulai, Oi melahirkan. Bayinya diambil alih pengasuhannya oleh Dinas Sosial, dan Oi kembali melanjutkan pendidikan di pesantren. Sementara itu, ayahnya dipenjara, meski keadilan hukum tak pernah bisa sepenuhnya menyembuhkan luka batin seorang anak.

MENEMBUS BATAS UNTUK ANAK PANTI

Kisah Oi hanyalah satu dari ratusan cerita dampingan yang dilakukan para kader Fatayat di Kabupaten Blitar. Sejak 2021, wilayah kerja mereka mencakup lima kecamatan: Kanigoro, Talun, Kesamben, Sanan Kulon, dan Nglegok. Tahun berikutnya, wilayah berpindah ke Ponggok dan Gandusari. Namun, batas administrasi tak pernah membatasi langkah para kader. Mereka siap turun ke manapun ketika panggilan kemanusiaan datang.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi kader adalah membuka akses layanan kesehatan bagi anak-anak panti asuhan yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Anak-anak asuh di LKSA Ibnu Mas'ud, misalnya, kesulitan mendapatkan BPJS karena tidak memiliki KK. Kader bersama staf data bekerja keras—mulai dari desa hingga kabupaten—untuk menyusun dokumen kependudukan tersendiri bagi mereka.

Dari 100 anak yang diajukan, 32 berhasil mendapatkan PBID. Selanjutnya, mereka juga mendapatkan pemeriksaan tuberkulosis secara menyeluruh. Sebanyak 59 anak menerima suntikan tuberkulin, dan tiga diantaranya dinyatakan positif. Kader mendampingi mereka sampai ke layanan kesehatan tingkat dua untuk pengobatan lanjutan. Ini bukan kerja mudah. Tapi seperti kata mereka, *"Tidak ada anak yang tidak berhak sehat."*

Untuk menguatkan kerja pendampingan, kader menjalin kemitraan dengan berbagai instansi. Sebuah grup Whatsapp yang terdiri dari Bupati Blitar, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dukcapil, BPJS, hingga RSUD Ngudi Waluyo menjadi ruang koordinasi cepat. Melalui grup ini, berbagai kebutuhan warga miskin seperti layanan kesehatan dan pengurusan administrasi dapat direspons dalam waktu singkat.

Kerja sama pun terjalin dengan LAZISNU, yang menyediakan 37 kartu sehat bagi anak yatim piatu di Ponggok. Kartu ini memberikan akses pengobatan dan sunat gratis. CSR RSUD Blitar turut memberikan diskon biaya pengobatan bagi pasien yang belum memiliki jaminan. Bahkan, para suami kader ikut turun tangan. Mereka tergabung dalam grup pendampingan dan membantu jika para kader sedang tidak bisa hadir. Ini bukan hanya kerja perempuan, tapi gerakan keluarga untuk kemanusiaan.

INI BUKAN SEKADAR TUGAS

Pendampingan kader membuahkan hasil nyata. Oi bisa melahirkan dengan selamat dan kembali bersekolah. Anak-anak asuh memiliki jaminan kesehatan dan akses pengobatan. Warga miskin di desa-desa pelosok bisa mendapatkan JKN PBI setelah bertahun-tahun tertinggal. Bahkan, warga dengan gangguan jiwa yang sebelumnya dipasung kini bisa dirawat secara medis.

Salah satu kisah menyentuh datang dari Kader Titik yang membantu warga dengan penyakit darah menggumpal. Biaya pengobatannya mencapai Rp 4 juta per bulan. Ia tak menyerah. Ia berkoordinasi dengan kepala desa, mengurus dokumen, hingga berhasil mendaftarkan pasien ke PBI. Keluarga pasien bahkan mendoakannya masuk surga. Dalam kasus lain, Titik membantu warga dengan gangguan jiwa untuk dirujuk ke RS Menur Surabaya. Ia mengurus administrasi, pendampingan medis, dan transportasi—semua dijalankan dengan hati.

Sementara itu, Ririn, seorang guru MI dan kader dari Nglegok, menggalang dana untuk pasien perempuan miskin yang harus diamputasi akibat diabetes. Ia tak hanya mencari JKN PBI, tapi juga bantuan dari RSUD, LAZISNU, Yayasan PLN, dan bahkan menggalang open donasi di kalangan sahabat Fatayat. Pasien berhasil dioperasi dan kini pulih perlahan.

Para kader sadar bahwa kerja mereka melampaui peran organisasi. Ini tentang kemanusiaan, tentang memastikan tak ada yang tertinggal. Yuhana A'yunin, sang koordinator, mengaku tidak pernah menyangka bahwa menjadi kader Fatayat akan membawanya pada perjuangan sebesar ini. Ia merasa mendapat kehormatan saat bisa menjadi saksi dan penguat bagi anak seperti Oi.

> **“Satu NIK bagi mereka bisa jadi pintu menuju pengobatan, pendidikan, dan masa depan”**
>
> Umul Fata Afidah, Kader

Umul Fata Afidah, yang fokus pada anak panti asuhan, menyebut bahwa setiap data yang berhasil diverifikasi adalah harapan baru. Sementara itu Titik Harianti mengakui bahwa pekerjaan ini sering melelahkan secara fisik dan emosional, tapi justru memberikan kepuasan

batin yang tak tergantikan. Ia berkata, “Ketika keluarga pasien menangis karena akhirnya bisa berobat, di situlah saya merasa cukup.”

Ririn menyebut bahwa pendampingan ini membuatnya lebih peka dan terlatih dalam menggalang sumber daya. Ia kini terbiasa berbicara di hadapan pejabat atau audiensi ke rumah sakit, sesuatu yang dulu membuatnya gugup. *“Kini saya tahu bahwa suara kader itu bisa punya pengaruh,”* katanya.

Muna Indana menekankan pentingnya forum lintas sektor seperti semi-lokakarya yang rutin dilakukan di Kecamatan Talun. Melalui forum ini, kerja pendampingan menjadi lebih sistemik dan tidak parsial. Sementara itu, Widarti percaya bahwa keberhasilan pendampingan tergantung pada keberanian untuk menginisiasi kerja sama. *“Kita tidak bisa jalan sendiri,”* katanya. *“Tapi satu langkah kecil kita bisa membuka jalan besar bagi orang lain.”*

Foto 23. Para Kader Perempuan Kawal JKN Blitar

Kisah kader-kader perempuan di Kabupaten Blitar bukan hanya tentang layanan kesehatan, tapi tentang perjuangan menegakkan keadilan sosial di akar rumput. Mereka membuktikan bahwa keberpihakan bisa dijalankan dari desa, dari komunitas, dari rumah-rumah kecil yang jauh dari pusat kekuasaan. Dukungan pun datang dari lingkaran terdekat mereka. Para suami kader tergabung dalam grup WhatsApp dan dijuluki “Persatuan Papi-Papi Fatayat”, siap membantu mengantar istri mereka jika dibutuhkan. Dalam dunia yang sering tak adil bagi yang miskin dan terluka, para kader tak pernah lelah mengawal hak warga untuk hidup sehat dan bermartabat.

MENGENAL KADER PEREMPUAN KAWAL JKN KABUPATEN BLITAR

Yuhana A'yunin

Sebagai Kepala TK, penyuluh agama, dan koordinator kader, Yuhana atau Yuha aktif mendampingi pasien dari keluarga miskin, termasuk anak korban kekerasan seksual. Ia mengawal akses kesehatan dan hukum, serta menjalin kemitraan dengan LAZISNU dan CSR RSUD Ngudi Waluyo Blitar. Yuhana memimpin audiensi lintas instansi untuk memperjuangkan hak pasien atas JKN dan bantuan sosial. Ia juga menangani banyak kasus administrasi kepesertaan BPJS seperti pendaftaran baru, perubahan data, dan pengecekan status. Dedikasi dan perannya sangat penting dalam menggerakkan jejaring dan sumber daya demi memperjuangkan layanan kesehatan yang adil bagi kelompok rentan di Blitar.

Umul Fata Afidah

Sebagai staf data tim, tanggung jawab utama Umul Fata adalah pada pendataan laporan kader. Namun pengasuh LKSA Ibnu Mas'ud ini juga terjun langsung mendampingi anak panti dan siswa dari keluarga tidak mampu. Ia mengupayakan kepesertaan BPJS bagi anak-anak asuh, memfasilitasi pemeriksaan TBC, serta mengawal pengobatan rutin anak-anak yang positif. Ia turut mengurus dokumen kependudukan agar anak-anak panti bisa mengakses layanan kesehatan secara legal dan layak. Komitmennya terlihat dalam kerja administratif yang teliti dan pendampingan langsung ke fasilitas kesehatan. Melalui kerja sistematis dan kepedulian terhadap kelompok marginal, Fata menjadi pilar penting dalam memperjuangkan hak dasar anak-anak yang kerap terlupakan.

Titik Harianti

Sebagai wiraswasta dan Koordinator Kesehatan PC Fatayat Blitar, Titik aktif memperjuangkan akses kesehatan warga miskin. Ia bekerja sama dengan desa untuk menyepakati kriteria peserta PBI dan mengawal pengajuannya. Salah satu pendampingannya adalah pasien kelainan darah dengan biaya pengobatan tinggi yang akhirnya mendapat JKN PBI. Titik juga membantu ODGJ yang dipasung untuk dirawat di RS Menur. Ia berkoordinasi lintas pihak, dari bidan hingga Dinkes, demi memastikan hak layanan medis terpenuhi. Pengabdiannya yang tulus dan menyeluruh menjadikannya sosok kader yang tak hanya hadir sebagai fasilitator, tapi juga penopang harapan warga.

Ririn Diyah Wiheni

Guru MI dan Ketua PAC Fatayat Nglegok ini dikenal aktif mendampingi pasien perempuan miskin. Ia mengawal persalinan remaja hamil di luar nikah dan pasien diabetes yang harus diamputasi. Ririn tak hanya mengurus kepesertaan PBI, tapi juga mencari dana melalui berbagai jalur: CSR, yayasan, dan donasi pribadi. Ia terbiasa berdialog dengan pejabat dan rumah sakit untuk mengamankan hak pasien. Sosialisasi yang ia lakukan bahkan membuatnya sempat dikira petugas BPJS. Dengan keberanian dan kepedulian tinggi, Ririn membuktikan bahwa suara kader bisa membuka akses layanan bagi yang paling membutuhkan.

Muna Indana

Sebagai guru MI dan Ketua PAC Fatayat Talun, Muna aktif dalam pendampingan administrasi JKN. Ia memanfaatkan forum semi-lokakarya lintas sektor di Kecamatan Talun untuk mempercepat koordinasi, khususnya dengan bidan desa. Forum ini memperkuat sistem respons cepat terhadap kasus pasien. Muna menangani berbagai kasus administratif mulai dari pendaftaran, aktivasi ulang, hingga perubahan data peserta JKN. Ia memastikan warga desa yang rentan tidak tersisih dari sistem layanan kesehatan. Dengan jejaring lintas instansi dan pendekatan sistemik, Muna menunjukkan bahwa kerja kader bisa efektif jika dibarengi kolaborasi dan keberanian menginisiasi solusi.

Widarti

Sebagai wiraswasta dan Ketua PAC Fatayat Ponggok, Widarti aktif mengurus JKN PBI bagi keluarga miskin dan pasien berisiko tinggi. Ia mendampingi ibu hamil dengan diabetes dan keputihan parah hingga dirujuk untuk operasi caesar. Ia juga memfasilitasi bayi lahir dengan komplikasi agar mendapat perawatan intensif. Widarti menjalin kerja sama dengan CSR dan fasilitas kesehatan untuk membantu pasien yang belum memiliki JKN. Dedikasi dan kecepatan tanggapnya menjadikannya sosok penting dalam menjaga akses layanan medis di desa-desa. Komitmennya mencerminkan kepekaan tinggi terhadap kondisi ibu dan anak yang rentan di pelosok.

Yetti Faula

Yetti, guru Bahasa Indonesia dan Ketua PAC Gandusari, kerap mendampingi pasien ibu hamil dalam kondisi darurat. Ia membantu pasien pasca-operasi caesar yang mengalami pendarahan dan demam tinggi, serta mendampingi proses pengobatan hingga selesai. Yetti juga membantu keluarga miskin mengakses bantuan ambulans dari LAZISNU dan mengawal proses pengajuan JKN PBI yang sempat tersendat di Dinas Sosial. Selain pendampingan langsung, ia aktif menjalin koordinasi dengan pemerintah desa untuk mempercepat akses layanan. Yetti menunjukkan bahwa perhatian terhadap kasus-kasus detail bisa menyelamatkan nyawa dan menjaga keberlangsungan layanan kesehatan bagi keluarga miskin.

KISAH KADER

PEREMPUAN KAWAL JKN

KOTA TERNATE

GERAK CEPAT MELAWAN KETERBATASAN DI TERNATE

GERAK CEPAT DAN KOLABORASI MENDAMPINGI ROSA

Rosa, anak perempuan berusia tujuh tahun, tinggal di salah satu sudut kota Ternate, Maluku Utara. Ia adalah anak dari pasangan dengan penghasilan terbatas—ayahnya bekerja sebagai buruh lepas, sementara ibunya menjadi tenaga honorer di sebuah sekolah dasar negeri. Dalam kondisi ekonomi yang serba kekurangan itu, Rosa harus menghadapi kenyataan pahit: tubuhnya menyimpan penyakit serius.

Awalnya, tanda-tanda gangguan kesehatan Rosa terlihat samar. Ia sering kelelahan saat bermain, tidak seaktif anak-anak lain. Hal itu membuat bude-nya khawatir. Dorongan dari sang bude akhirnya membuat Rosa dibawa ke klinik untuk diperiksa. Dokter curiga ia mengalami kebocoran katup jantung dan menyarankan pemeriksaan lanjutan menggunakan alat echo jantung. Namun alat di klinik tersebut rusak. Mereka pun berpindah ke klinik kedua, dan disanalah vonis berat dijatuhkan: Rosa mengalami kebocoran katup jantung selebar 8 mm dan membutuhkan operasi segera.

Namun tidak ada fasilitas kesehatan di Ternate yang mampu menangani operasi jantung anak. Kota ini, meskipun menjadi ibu kota provinsi, belum memiliki fasilitas kesehatan jantung anak yang memadai. Dokter menyarankan agar Rosa dirujuk ke Jakarta—yang harus ditempuh dengan lima jam penerbangan. Biaya pengobatan memang bisa ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi biaya perjalanan, akomodasi, dan kebutuhan hidup selama di Jakarta menjadi penghalang besar bagi keluarga Rosa.

Keluarga Rosa pun mencoba peruntungan lain: membuat flyer permohonan donasi. Dalam proses itulah flyer tersebut sampai ke tangan Wahidah, Koordinator Program Perempuan Kawal JKN di Ternate. Menyadari bahwa kasus Rosa sangat mendesak, Wahidah dan timnya segera bertindak.

Tim Perempuan Kawal JKN langsung menemui keluarga Rosa. Mereka tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga membantu mengakses jejaring bantuan pemerintah. Ini bukan langkah yang mudah, mengingat selama ini koordinasi antara warga miskin dan institusi pemerintah seringkali tidak berjalan lancar. Namun, Wahidah dan tim sudah memiliki dasar hubungan yang cukup kuat, berkat kegiatan launching program sebelumnya yang melibatkan langsung Walikota Ternate, BPJS Kesehatan, dan dinas kesehatan setempat.

Dengan pendekatan yang rapi dan strategis, Wahidah menghubungi Walikota Ternate dan Kepala Dinas Kesehatan. Respons yang mereka terima sangat positif: Walikota bahkan mengunjungi keluarga Rosa secara langsung. Setelah itu, pemerintah kota memutuskan untuk memberikan tiket pesawat pulang-pergi bagi tiga orang dan bantuan dana sebesar Rp10 juta.

Selama satu bulan, Rosa, ibu, dan budenya tinggal di Jakarta. Pada Januari 2022, operasi jantung berhasil dilakukan. Proses pemulihan berlangsung lancar, dan Rosa bisa kembali bersekolah. Ini bukan hanya kemenangan bagi Rosa dan keluarganya, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi strategis dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat bisa menghasilkan perubahan konkret.

Namun, Rosa hanyalah satu dari sekian banyak anak yang menghadapi ketimpangan akses layanan kesehatan di Indonesia Timur. Kota Ternate hanya memiliki tujuh rumah sakit, dengan keterbatasan alat dan tenaga kesehatan. Pasien yang membutuhkan alat canggih harus dirujuk ke kota besar seperti Makassar, Ambon, atau Jakarta. Dalam konteks inilah, pendampingan yang dilakukan kader menjadi sangat penting. Ia tidak hanya memastikan kepesertaan pada JKN, tetapi juga menghubungkan keluarga pasien dengan berbagai sumber daya sehingga pasien dapat benar-benar berangkat berobat.

MEMBERI DAMPAK NYATA DENGAN DI TENGAH KETERBATASAN

Cerita tentang Rosa menjadi semacam panggilan bagi kader-kader Perempuan Kawal JKN di Ternate untuk bekerja lebih keras. Namun jalan mereka penuh tantangan.

Tidak seperti tim-tim lain di Jawa yang bisa mengandalkan motor pribadi dan dukungan organisasi Fatayat yang sudah mapan, kader di Ternate bekerja nyaris tanpa infrastruktur. Mayoritas adalah mahasiswa atau fresh graduate, yang sebelumnya

aktif di organisasi PMII dan belum memiliki pengalaman panjang dalam kerja sosial berbasis komunitas. Mobilitas menjadi tantangan besar. Tanpa kendaraan pribadi, mereka harus mengandalkan angkot atau ojek online yang tidak hanya mahal, tetapi juga tidak efisien.

Tim ini pun tidak memiliki dukungan keuangan dari organisasi lokal. Fatayat NU Cabang Kota Ternate bahkan belum terbentuk ketika program ini dijalankan. Seluruh kegiatan hanya mengandalkan dana dari program. Karena itu, kegiatan pendampingan pun difokuskan pada kasus-kasus individual yang dianggap mendesak dan bisa diselesaikan cepat. Strategi ini menjadi pilihan realistis di tengah keterbatasan sumber daya.

Foto 25. Melakukan Sosialisasi Pada Masyarakat

Meski demikian, usaha untuk memperkuat kelembagaan tetap dilakukan. Pada tahun 2024, Fatayat Wilayah Maluku Utara menyelenggarakan konferensi untuk memilih kepengurusan baru. Sebagian kader program ini terlibat dan membantu memperkuat struktur Fatayat. Dampak nyata dari pendampingan kader tidak hanya terlihat dalam kasus Rosa. Rita Mulyani Niru, yang bertugas mencatat kegiatan, membantu memastikan setiap kasus terdokumentasi dan bisa dipelajari. Eba Iswara Iskandar, misalnya, berhasil mendampingi ibu dari Halmahera Barat yang harus menjalani operasi caesar namun belum terdaftar dalam JKN. Berkat Eba, ibu tersebut bisa mengakses skema PBI APBD dan menjalani operasi tepat waktu.

Fatima, kader lainnya, membantu warga yang tidak mampu dan belum memiliki dokumen kependudukan lengkap untuk bisa masuk dalam JKN. Tantangannya nyata: banyak anak lahir di luar nikah tidak memiliki akta kelahiran dan surat nikah orang tua, membuat mereka tidak bisa masuk dalam skema PBI. Fatima melakukan pendekatan ke kelurahan dan kecamatan, membawa surat resmi program, agar bisa tetap mendampingi warga.

Nurlisa Ajuan, atau Ica, kerap menghadapi pelayanan tidak maksimal dari rumah sakit. Dalam kasus semacam itu, ia berusaha membangun komunikasi lebih baik dengan staf medis dan mengedukasi pasien tentang hak-hak mereka. Sementara itu, Kausar Rusmin dan Rita Wahyuni Amir aktif dalam sosialisasi JKN, pengecekan dan reaktivasi kepesertaan.

Keberhasilan mereka tidak hanya diukur dari jumlah pasien yang tertolong, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak mereka sebagai peserta JKN, serta mulai terbentuknya jaringan informal kader, keluarga pasien, dan pemerintah lokal.

PEREMPUAN MUDA DAN SEMANGAT KOLEKTIF DI TERNATE

Apa yang membedakan tim Ternate dari tim-tim lain di program Perempuan Kawal JKN adalah komposisi mereka yang sangat muda, sebagian besar mahasiswa atau baru lulus. Mereka bekerja tanpa dukungan logistik kuat, dan menghadapi tantangan geografis serta mobilitas yang berat. Namun justru di situlah letak kekuatannya.

Wahidah dan para kader lainnya membuktikan bahwa kerja advokasi tidak harus dimulai dari struktur yang mapan. Ia bisa tumbuh dari kesadaran bersama, dari pengalaman langsung mendampingi pasien, dari frustasi terhadap birokrasi, dan dari keinginan untuk membuat perubahan, sekecil apa pun.

Foto 26. Melakukan Advokasi Kepada Stakeholder Pemerintah

Kader-kader ini juga menunjukkan bahwa pelatihan tidak harus formal. Dengan langsung terjun ke lapangan, mereka belajar dengan cepat. Pendekatan kolektif-kolegial membuat setiap kader merasa memiliki ruang dan tanggung jawab, bukan sekadar mengikuti arahan dari atas.

Ke depan, mereka sadar bahwa keberlanjutan program sangat bergantung pada kelembagaan dan regenerasi. Mereka berharap Fatayat NU Cabang Kota Ternate bisa segera aktif sepenuhnya dan menjadi rumah bagi kerja-kerja advokasi kesehatan yang selama ini mereka mulai.

Cerita kader Perempuan Kawal JKN di Ternate adalah tentang munculnya gerakan perempuan muda di Ternate yang melampaui batasan struktur, membangun solidaritas, dan menghadirkan harapan di tengah sistem layanan kesehatan yang masih timpang. Mereka bukan sekadar pendamping; mereka adalah penjaga keadilan kesehatan di wilayah paling timur Indonesia.

MENGENAL KADER PEREMPUAN KAWAL JKN KOTA TERNATE

Wahidah Abd A. Rahman

Wahidah adalah mahasiswa tingkat akhir saat program Perempuan Kawal JKN dimulai. Ia aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), yang membentuk dasar kepemimpinannya dalam advokasi isu sosial. Melalui jejaring kampus, Wahidah membentuk tim kader dari sesama mahasiswa. Ia dikenal gesit dan strategis, khususnya dalam menangani kasus-kasus gawat darurat yang luput dari perhatian pemerintah. Contoh paling menonjol adalah saat ia mengadvokasi kasus anak dengan kebocoran katup jantung. Berkat pendekatannya, pemerintah kota turun tangan memberikan dukungan dana dan logistik hingga sang anak bisa menjalani operasi di Jakarta. Wahidah adalah sosok kunci dalam membangun relasi antara tim kader dan instansi pemerintah di Ternate.

Rita Mulyani Niru

Rita berperan sebagai pencatat utama seluruh kegiatan pendampingan dan sosialisasi tim Perempuan Kawal JKN Ternate. Dengan teliti dan konsisten, ia mencatat setiap intervensi kader terhadap warga, termasuk data pasien, jenis bantuan, serta hasil pendampingan. Perannya sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan kontinuitas program, sekaligus menyediakan basis data yang valid untuk advokasi lebih lanjut. Rita dikenal tenang dan cermat, menjadi pengingat tim terhadap pentingnya bukti tertulis dan laporan rutin. Ia juga membantu menyusun dokumentasi untuk laporan ke instansi pemerintah maupun kepada mitra organisasi. Meski lebih banyak bekerja di balik layar, kontribusinya sangat esensial bagi keberlangsungan program.

Eba Iswara Iskandar

Eba bergabung sejak awal program dan dikenal karena komitmennya terhadap warga miskin di Kelurahan Fitu. Salah satu kisah pendampingannya yang paling berkesan adalah saat membantu seorang ibu dari Halmahera Barat yang harus menjalani operasi caesar namun tidak terdaftar dalam JKN. Dengan sigap, Eba mendampingi pengurusan PBI APBD ke Dinas Kesehatan, hingga pasien bisa segera menjalani tindakan medis. Ia rutin menyambangi warga tidak mampu dan membantu mendaftarkan mereka sebagai peserta JKN kelas PBI. Respons positif dari masyarakat membuat Eba berinisiatif membentuk Sahabat Sehat Fatayat, sebuah

jaringan relawan yang diharapkannya bisa memperluas dampak kerja kader. Dukungan dari Dinas Sosial membuat semangatnya semakin kuat.

Nurlisa Ajuan

Dikenal dengan nama panggilan Ica, Nurlisa mulai bergabung sebagai kader pada Juni 2023. Ia aktif dalam sosialisasi manfaat JKN dan pendampingan pasien, terutama di rumah sakit. Salah satu kasus yang membekas baginya adalah ketika ia mendampingi pasien yang mendapat perlakuan tidak memadai dari tenaga medis. Kejadian tersebut mendorongnya untuk lebih gencar menyuarakan hak-hak pasien dan menjembatani komunikasi antara warga dan petugas kesehatan. Ica menunjukkan bahwa advokasi tak hanya soal kebijakan, tetapi juga soal membangun hubungan empatik dan keberanian menyuarakan ketidakadilan. Ia mulai dikenal warga sekitar sebagai tempat bertanya jika menghadapi kendala terkait JKN.

Fatima

Bergabung sejak tahun 2022, Fatima mengawali peran sebagai kader dengan penuh keraguan karena kurangnya pengalaman lapangan. Namun ia cepat belajar dan segera membangun jaringan dengan staf kelurahan dan kecamatan. Ia dikenal disiplin—selalu membawa surat tugas resmi saat melakukan sosialisasi atau pendampingan. Fatima banyak mendampingi warga tidak mampu yang sebelumnya masuk JKN mandiri karena kebutuhan mendesak, tapi akhirnya menunggak. Ia juga menghadapi tantangan administratif, seperti anak lahir di luar nikah yang kesulitan masuk PBI karena tidak memiliki akta kelahiran atau surat nikah orang tua. Dengan kesabaran, Fatima terus memperjuangkan agar tidak ada warga miskin yang tertinggal dari perlindungan JKN.

Kausar Rusmin

Kausar bergabung pada Juni 2024 dan langsung terjun dalam kegiatan sosialisasi tentang JKN. Ia aktif membantu warga yang memerlukan pengecekan dan reaktivasi status kepesertaan, terutama bagi peserta JKN PBI yang tidak sadar bahwa kepesertaannya telah nonaktif. Ia berusaha menjangkau kelompok-kelompok marjinal di wilayahnya agar kembali bisa

mengakses layanan kesehatan. Kausar cepat belajar dan mampu menjelaskan prosedur JKN secara sederhana dan persuasif, sehingga warga merasa nyaman berkonsultasi dengannya. Meski tergolong baru, kehadirannya memperkuat kerja tim dalam menjangkau warga yang belum terpapar informasi tentang JKN secara memadai.

Rita Wahyuni Amir

Rita mulai bergabung pada akhir 2023 dan sejak awal aktif mendampingi pasien di rumah sakit. Ia dikenal ramah dan tekun, mampu membangun hubungan yang baik dengan pasien dan keluarga mereka. Rita juga belajar cepat mengenai prosedur administratif dan mekanisme layanan rujukan, sehingga banyak pasien merasa terbantu saat harus berpindah layanan antar fasilitas. Ia sangat memperhatikan aspek psikologis pasien, kerap mendampingi secara emosional selain teknis. Dalam beberapa kasus, ia juga membantu pasien mengurus dokumen JKN dan menghubungkan dengan petugas rumah sakit jika terjadi kendala dalam pelayanan.

Kader Lainnya

Tim Ternate juga sempat diperkuat oleh sejumlah kader dan staf tambahan yang memberikan kontribusi penting. Nifa Muhammad dan Harisa Torano membantu dalam pencatatan dan pengelolaan data, sementara Harisa juga sempat berperan sebagai kader lapangan. Siti Wahida Arsyad, Sukmawalda Araman, Sukarsi Ajid, Sukarsi Mudar, dan Kausar (yang kini menjadi kader aktif) turut terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan warga. Mereka membantu menjangkau warga di berbagai kelurahan, memperluas cakupan informasi JKN, serta mendampingi proses pendaftaran peserta baru. Meski sebagian besar bekerja dalam waktu terbatas, kontribusi mereka tetap memberikan dampak yang signifikan dalam memperkuat basis gerakan perempuan muda di Ternate.

EPILOG

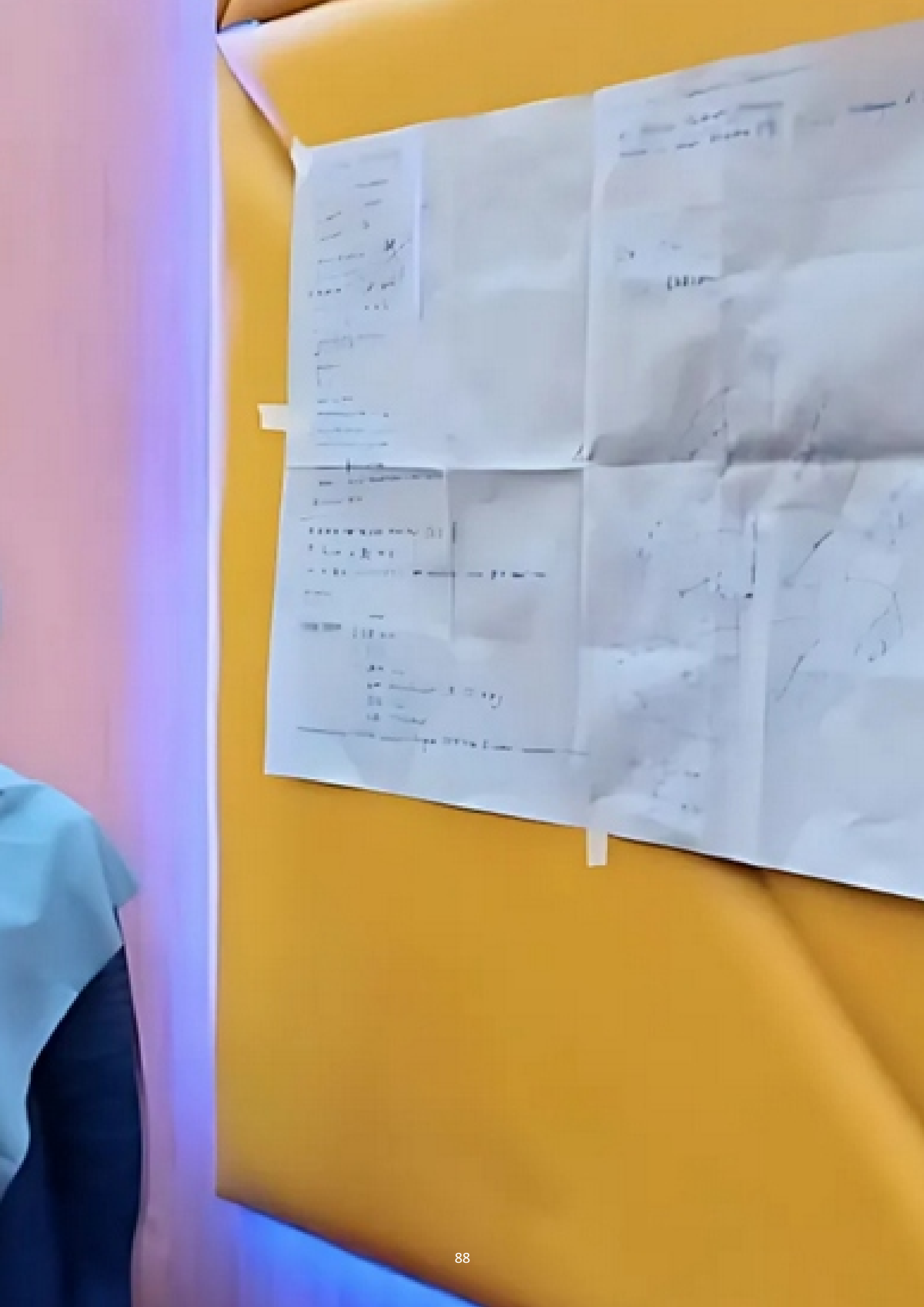

EPILOG

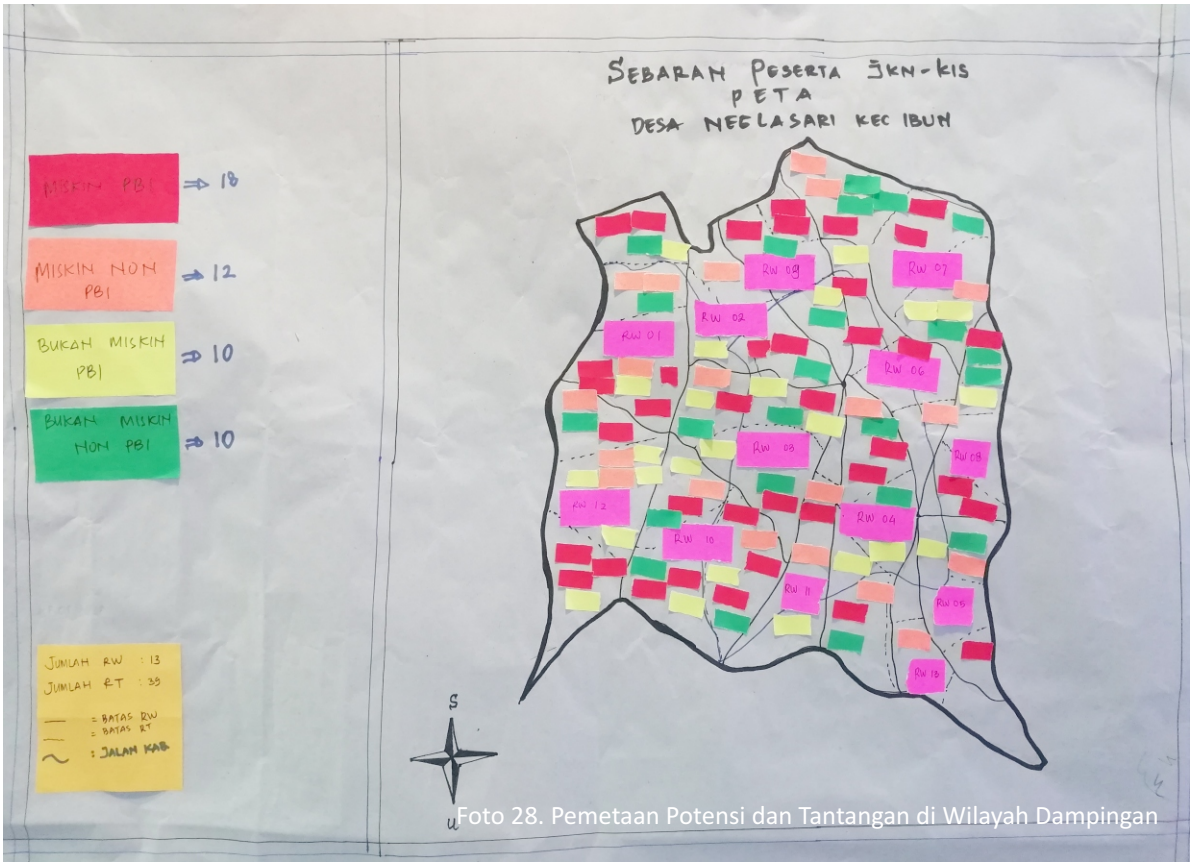

Foto 28. Pemetaan Potensi dan Tantangan di Wilayah Dampingan

Hari itu, bulan Desember 2020. Kami semua duduk memandang kertas-kertas plano yang tertempel di dinding. Pada kertas plano tersebut tergambar peta kasar desa dan kecamatan tempat kader akan bekerja,dengan titik-titik di mana kira- kira konsentrasi penduduk desa yang miskin dan menjadi target pertama untuk sosialisasi dan pendampingan program Perempuan Kawal JKN. Pagi itu adalah hari ketiga pelatihan kader sebelum mulai menjalankan program. Dua hari kami bersama-sama mendiskusikan materi tentang kebijakan JKN, apa saja aturannya (sejauh yang kami bisa tangkap), dan sebagainya. Para kader juga sudah mendapat gambaran pembekalan awal dari instansi yang terkait: BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan.

Meskipun sudah menjalani tiga hari pelatihan, keraguan masih terlihat merata pada semua tim di daerah lokasi program. Pertama, karena JKN sendiri merupakan kebijakan yang kompleks serta melibatkan banyak pihak. Tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga pemerintah di tingkat provinsi dan nasional. Pendaftaran kepesertaan PBI, misalnya, harus melalui jenjang dari pemerintah desa hingga nanti dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Belum lagi pemahaman tentang mekanisme layanan kesehatan berjenjang, mulai dari fasilitas kesehatan primer hingga lanjutan. Belum lagi ketentuan tentang apa yang bisa dijamin JKN dan yang tidak.

Kedua, meskipun kader-kader Fatayat juga bergerak di isu kesehatan, pengalaman pendampingan secara menyeluruh termasuk baru bagi mereka. Pendampingan ini membutuhkan mobilitas yang lincah dan kemampuan untuk berkomunikasi dan meyakinkan pihak lain. Belum lagi jika ternyata kader harus mengadvokasi kepentingan pasien – misalnya memastikan kamar untuk pasien yang memang butuh rawat inap, memastikan rumah sakit memberikan rujukan balik atau pengantar, dan lain sebagian nya.

Keraguan ini bertambah karena menghadapi skeptisisme dari para pengambil kebijakan. “Fatayat itu siapa? Apa kapasitas dan pengetahuannya tentang BPJS?” Demikian ucap salah satu pejabat di daerah program saat kader Fatayat melakukan audiensi untuk memperkenalkan program ini.

Namun keraguan itu tidak menghambat para kader untuk memulai program ini. Pelan-pelan, mereka memulai dengan melakukan sosialisasi di jaringan Fatayat. Melalui pengajian, melalui pertemuan dengan warga sekitar, melalui sekolah-sekolah tempat para kader bekerja. Berkenalan dengan aparat desa dan kecamatan untuk menyampaikan program ini. Menyambangi pula pertemuan-pertemuan di tingkat desa dan kelurahan.

Dari sosialisasi itu muncul permintaan-permintaan dari warga. Paling banyak, mereka yang minta bantuan mengurus kepesertaan PBI-nya. Ada yang minta didampingi berobat ke fasilitas kesehatan. Ada yang butuh bantuan dana tambahan transportasi untuk berobat. Cerita-cerita dari kedelapan daerah yang ada di buku ini menggambarkan semua perjuangan itu.

Bagi sahabat-sahabat kader, kerja pendampingan ini akhirnya bukan sekedar untuk melaksanakan program. Banyak emosi atau perasaaan yang muncul. Rasa gembira dan bangga ketika berhasil membantu ''puluhan' warga miskin untuk masuk sebagai peserta PBI. Rasa haru ketika pasien kanker payudara stadium empat, yang sudah pasrah karena tidak bisa berobat, pelan-pelan membaik setelah terurus kepesertaan PBI-nya dan menjalani perawatan rutin. Tentunya ada pula kesedihan, misalnya saat pasien yang didampingi ternyata sudah tidak bisa tertolong lagi. Ada pula rasa frustasi ketika jalur-jalur pendaftaran PBI seperti tertutup bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Pun menghadapi tingkah laku masyarakat yang bermacam-macam, termasuk dimarahi warga karena permohonan kepesertaan PBI tidak kunjung datang.

Empat tahun perjalanan itu, kader merasakan sekali perbedaannya. Tidak hanya pengetahuan dan kemampuan untuk berkolaborasi dengan pemerintah. Bagi kader, yang paling terasa adalah perasaan berguna, bermanfaat bagi orang lain. Apalagi ketika perasaan ini ternyata tidak sepihak, para pasien mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam. Bahkan pejabat yang awalnya skeptis pun dengan jujur mengakui peran kader tersebut.

“Jadi lebih banyak tahu, lebih banyak ilmu, dan banyak kenalan. Jadi seperti terkenal, banyak yang menelpon minta bantuan.”

Kader Perempuan Kawal JKN

“Terima kasih banget, kader Fatayat sudah membantu, padahal tadinya tidak kenal sama sekali.”

Salah satu pasien dampingan

“Saya awalnya memang tidak percaya. Tapi saya lihat teman-teman Fatayat ini ternyata serius juga pendampingannya, dan saya yakin ternyata bisa.”

Pejabat BPJS di Kabupaten Pati

Menjelang berakhirnya program, sebagian besar tim merasakan, sulit untuk berhenti meskipun program resmi selesai. Bagaimana bisa berhenti, kalau ada yang minta bantuan, masa kami tolak? Begitu pernyataan mereka.

Kami semua berharap, perjalanan demi memastikan keadilan bagi rakyat Indonesia di bidang kesehatan ini tidak berhenti di sini, dan dukungan kepada kader Fatayat dapat terus mengalir.

PIMPINAN PUSAT

FATAYAT

NAHDLATUL ULAMA

https://fatayat-nu.or.id

KISAH KADER

PEREMPUAN KAWAL JKN

2021 - 2025